

7-11-58
SUS

K 21

**KAJIAN PERUBAHAN PADA PASCA HUNI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN OLEH MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
DI KELURAHAN SANGKRAH KOTA SURAKARTA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Pada Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota**

Oleh :

**GUNAWAN BUDI SUSETYO
NIM. L4D000121**



**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keşarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, 3 Oktober 2002



GUNAWAN BUDI SUSETYO
NIM. L4D000121

**KAJIAN PERUBAHAN PADA PASCA HUNI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN OLEH MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
DI KELURAHAN SANGKRAH KOTA SURAKARTA**

Tesis Diajukan Kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

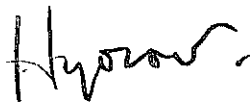
GUNAWAN BUDI SUSETYO
NIM. L4D000121

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 3 Oktober Tahun 2002

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 3 Oktober 2002

Pembimbing Pendamping



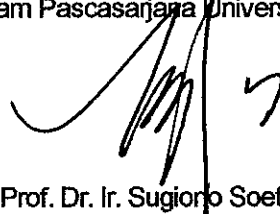
Ir. Hadi Wahyono, MA.

Pembimbing Utama



Ir. Nany Yuliasuti, MSP.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

"Justru ilmu pengetahuanlah yang membawa kerukunan serta kerja sama antara para ilmuwan berbagai agama, karena mereka sadar bahwa mereka memperjuangkan tujuan yang sama, yakni bertanya kepada alam secara benar agar memperoleh jawaban yang syah dari alam mengenai banyak teka-teki gejala-gejala alam mikro maupun makro. Kata universal mungkin belum terucap eksplisit di zaman dulu, tetapi mereka tahu, bahwa kebenaran hanyalah satu, dan itu tidak dimonopoli oleh siapapun" (Y. B. Mangunwijaya)

Kupersentuhkan kepada:

- ❑ Istriku tercinta Tri Mulyani, sumber inspirasi dan semangatku
- ❑ Buah hatiku: Damar Pramudita dan Bayu Kirti Denantoro
- ❑ Ayah dan Ibu terkasih, dengan limpahan doa dan restunya
- ❑ Saudaraku, terutama adiknya Yudi Adistira yang telah membantuku
- ❑ Almamaterku, Universitas Diponegoro yang penuh kenangan

ABSTRAK

Pemerintah Kota Surakarta pada sekitar tahun 1990-an telah melaksanakan konsolidasi lahan di bekas permukiman liar dan kumuh. Konsolidasi lahan tersebut meliputi kawasan seluas 0,35 hektar yang dihuni oleh 110 kepala keluarga di Kelurahan Sangkrah. Kapling-kapling penghuni diatur kembali, kemudian dibuatkan jalan lingkungan, drainase dan MCK Umum, selanjutnya penghuni membangun sendiri rumahnya sesuai kemampuan ekonomi mereka masing-masing (yang pada umumnya masih dibawah standar rumah sederhana yang layak dan sehat).

Kondisi pada tahun 2002 nampak terjadi perubahan. Kualitas fisik rumah penghuni rata-rata meningkat lebih baik, dan kondisi lingkungan permukiman terlihat bersih, rapi, dan cukup hijau. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah, sejauhmana perubahan fisik perumahan, sosial, dan ekonomi penghuni di kawasan penataan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan tersebut?

Untuk mengkaji fenomena di atas, penelitian ini menggunakan metoda penelitian statistik deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta telah membawa dampak terhadap perubahan fisik rumah penghuni, berupa tingkat perubahan sedang sebesar 38 % pada komponen lantai, tingkat perubahan sangat tinggi sebesar 19 % pada komponen tinggi dinding tembok, dan tingkat perubahan sedang sebesar 15 % pada komponen rangka atap. Fenomena rendahnya tingkat perubahan fisik rumah di kawasan penataan tersebut karena disebabkan oleh masih lemahnya tingkat pendapatan penghuni serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan tersebut. Meskipun begitu kajian penelitian ini menemukan bahwa yang menonjol yang mempengaruhi perubahan fisik rumah adalah faktor usia, dimana kecenderungan penghuni yang berusia antara 31 – 46 tahun ternyata lebih mampu dalam memenuhi kualitas fisik rumahnya dibanding kelompok usia antara 63 – 80 tahun. Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa usia produktif di kawasan penataan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan bagi kemajuan lingkungan permukiman di kawasan tersebut dimasa-masa mendatang. (2) Penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta telah membawa dampak terhadap perubahan sosial. Dampak tersebut dapat dilihat pada perubahan tipe rumah penghuni, dimana yang paling menonjol adalah tingkat perubahan sangat tinggi sebesar 6 %, yaitu perubahan rumah ke tipe 45. Meskipun begitu, berdasarkan fenomena tingkat perubahan sosial tersebut menunjukkan bahwa dalam periode pasca pembangunan perumahan, penghuni tidak banyak melakukan perubahan terhadap tipe rumahnya. Dan sebagaimana halnya pada kajian perubahan fisik rumah, maka yang menonjol yang mempengaruhi perubahan tipe rumah adalah faktor usia, dimana kecenderungan penghuni yang berusia antara 31 – 46 tahun ternyata lebih mampu dalam merubah tipe rumahnya dibanding kelompok usia yang lebih tua. Maka sekali lagi fakta menunjukkan bahwa usia produktif di kawasan penataan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan bagi kemajuan lingkungan permukiman di kawasan tersebut dimasa-masa mendatang. (3) Penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta telah membawa dampak terhadap perubahan ekonomi penghuni. Dampak tersebut dapat dilihat dari tingkat perubahan pendapatan penghuni, yaitu tingkat perubahan sedang sebesar 14 %. Meskipun begitu, berdasarkan fenomena tingkat perubahan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa dalam periode pasca pembangunan perumahan, tidak banyak terjadi perubahan terhadap tingkat pendapatan penghuni. Namun satu hal potensi yang perlu dilihat dalam kasus tingkat perubahan pendapatan penghuni adalah bahwa, faktor usia muda/produktif mempengaruhi perubahan ekonomi di kawasan tersebut. Sehingga ada harapan dimasa mendatang bahwa apabila ada pembinaan terhadap aspek peningkatan ketrampilan kerja dan peningkatan ekonomi penghuni maka kondisi ke depan akan lebih baik dibanding saat ini.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu diadakan pembinaan terhadap peningkatan ketrampilan kerja dan peningkatan ekonomi, khususnya kepada penghuni yang masih berusia muda/produktif di kawasan tersebut.

Disamping itu, dalam program penataan permukiman liar dan kumuh di wilayah perkotaan, yang karakteristiknya mirip dengan kasus di Kelurahan Sangkrah, nampaknya perlu diikuti dengan pembinaan terhadap aspek ekonomi penghuni, sehingga perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi penghuni akan lebih meningkat lagi.

ABSTRACT

In 1990s Surakarta Local Government has consolidated land in formerly illegal slump housing area. It covers 0.35 ha that was dwelling by 110 households in Sangkrah village. Lots were rearranged and then local roads, drainage and public toilets were made. And then the dwellers built their own houses in accordance with their each economics, that commonly are below simply houses standard that are health and proper.

In 2002 the condition seemed changes. Physically houses quality average improved much better and the condition of house environment looked clean, neat and green enough. The question was proposed in this study is how far physically houses changes, societies, and economics of the dwellers in the arranged area as well as what factors influencing the changes?

To study the above phenomena, this research used descriptive statistic method by using the qualitative and quantitative methods.

The conclusions are (1) illegal and slump housing arrangement in Sangkrah village has impacts toward physically house changes i.e. 38 % of the dwellers changed their floors, 19 % changed their walls, and 15 % changed their roofs. The phenomena of the low degree of the physically house changes caused by the low income and quality of their human resources in the area. This study found that the mean factor influencing the changes are age factor in which the trend of the dwellers having ages between 31 and 46 years old are having more affords in meeting physically house quality than the dwellers having ages between 63 and 80 years old. Based on the factors it showed that productive ages in the arranged area have potencies to be developed for the house environment progress in the area in the future. (2) illegal and slump house arrangement in Sangkrah village in Surakarta City has impacts towards social changes. The impacts can be seen on the type changes of the dweller houses where the rate is 6 % i.e. the changes of the type- 45 houses. Even though based on the phenomena the degree of the social change shows that in the period after house development , the dwellers were not much changed toward their houses. And as the study on the physically house changes, the prominent influencing house type changes are age factors where the dwellers having ages of between 31 and 46 years old are actually more affordable to change their house types compare to older-age groups. Once more time the facts showed that productive ages in the arranged area have potencies to be developed for the house environment progress in the area in the future. (3) the illegal and slump house arrangement in the Sangkrah Village in Surakarta City has broken out the impacts on the economic of the dwellers. The impacts can be seen from the changes of the dweller income i. e. 14 %. Even though, based on the phenomena of the degree of the economic changes showed that the period of after house development are not many changes on the dweller incomes. However, one potency should be seen in the case of the degree of the income changes of the dwellers is youth age or productive factor influencing economic changes in the area so that in the future there is hope if there are training on the working skill and income improvements. The future will be much better than this condition.

Recommendations on this study are needed to train on the working skill and economic improvement especially on the young-age or productive dwellers in the area.

In addition, in the illegal and slump house arrangement program in the urban area having similar characteristics with the case of the Sangkrah village seems to be followed by training on the dweller economic aspects so that physically house changes, social and dweller economies will more improve.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

Tesis yang berjudul **“Kajian Perubahan Pada Pasca Huni Pembangunan Perumahan Oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta”** merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Magister Teknik (MT) pada Program Magister Teknik Pembangunan Kota (MTPK) Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa karya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih memerlukan beberapa perbaikan. Meskipun begitu penulis berharap bahwa penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memberi sedikit sumbang saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis hingga berhasil menyelesaikan studi di MTPK UNDIP ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. **Bapak Walikota Tangerang**, yang telah memberi ijin sekolah.
2. **Pengelola Program CBUIM Loan ADB No. 1572 INO**, yang telah membantu membiayai kegiatan studi penulis.
3. **Ir. Nany Yulastuti, MSP** dan **Ir. Hadi Wahyono, MA**, sebagai pembimbing dan co-pembimbing dalam penyusunan tesis ini. Dengan segala kesabaran telah memberikan bimbingan kepada penulis, semoga jerih payah dan jasa Ibu serta Bapak bisa menampakkan manfaat yang besar bagi pembangunan dan perkembangan ilmu.
4. **Ir. Sunarti, MT** dan **PM. Broto Sunaryo, SE., MSP.**, sebagai pembahas dan penguji yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan karya tesis ini.
5. **Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA.**, sebagai Direktur Program MTPK Undip dan sebagai dosen pengajar yang telah memotivasi dan memberikan banyak ilmu dan wawasannya kepada seluruh mahasiswa tentang bagaimana sebaiknya seorang ‘planer’ itu bertindak.
6. **Seluruh dosen MTPK UNDIP**, yang telah membagikan ilmunya kepada penulis dan mahasiswa lainnya. Semoga dapat bermanfaat.
7. **Teman-teman se-angkatan di CBUIM IV**, terutama *Agus Andeng Kulim, Oki si kumis, Yan piti albar, Gunbilyur—saudara seperguruan—* yang telah banyak membantu dalam proses studi dan menjalani hari-hari panjang bersama-sama.
8. **Mbak Luluk, Mbak Didin, Mbak Ratih, Linda, Mas Janu dan Mas Pri**, segenap rekan di bagian administrasi Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP, atas segala bantuannya dari mulai awal proses penerimaan mahasiswa sampai berakhirnya masa perkuliahan.
9. **Semua pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga budi baik, bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Pada akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa karya tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga perlu kritik, saran dan masukan untuk perbaikan. Namun demikian, penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi para pembaca, terutama bagi pengembangan ilmu pembangunan kota pada khususnya maupun praktek penyelenggaraan pembangunan kota pada umumnya.

Semarang, awal Oktober, 2002

Gunawan Budi Susetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Sasaran Penelitian	5
1.3.3. Manfaat Penelitian	6
1.4. Ruang Lingkup	6
1.4.1. Ruang Lingkup Materi	6
1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah	7
1.5. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Metoda Penelitian	13
1.6.1. Metoda Pendekatan	13
1.6.1.1. Tingkat Perubahan Fisik Rumah	14
1.6.1.2. Tingkat Perubahan Sosial	15
1.6.1.3. Tingkat Perubahan Ekonomi	16
1.6.2. Kebutuhan Data	17
1.6.3. Populasi Penelitian dan Cara Pengambilan Sampel	19
1.6.4. Analisis Data	20
1.7. Sistematika Penulisan	21

BAB II. PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI WILAYAH PERKOTAAN

2.1. Perumahan Adalah Proses	23
2.2. Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	28
2.3. Standar Rumah Sederhana Yang Layak	32
2.4. Pengaruh Perubahan Fisik Perumahan	36
2.5. Kesimpulan Kajian Teori	38
2.6. Variabel dan Indikator Penelitian	40

BAB III. DESKRIPSI KAWASAN PENATAAN DI KELURAHAN SANGKRAH

3.1. Gambaran Umum Kelurahan Sangkrah.....	42
3.1.1. Letak Geografis	42
3.1.2. Batas Administrasi	42
3.1.3. Kependudukan	43
3.1.4. Kondisi Fisik.....	44
3.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
3.3. Kondisi Saat Ini Di Lokasi Penelitian.....	47
3.4. Perubahan Fisik Rumah.....	56
3.5. Perubahan Sosial.....	67
3.6. Perubahan Ekonomi.....	68

BAB IV. ANALISIS PERUBAHAN PADA PASCA HUNI PENATAAN PERMUKIMAN LIAR DI KELURAHAN SANGKRAH

4.1. Analisis Perubahan Fisik Rumah	70
4.1.1. Tingkat Perubahan Fisik Rumah	70
4.1.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Fisik Rumah..	73
4.2. Analisis Perubahan Sosial	74
4.2.1. Tingkat Perubahan Sosial	74
4.2.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial.....	76
4.3. Analisis Perubahan Ekonomi	77
4.3.1. Tingkat Perubahan Ekonomi	77
4.3.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Ekonomi.....	78
4.4. Rangkuman Hasil Analisis Perubahan.....	78

BAB V. P E N U T U P

5.1. Kesimpulan	82
5.2. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Kebutuhan Data Kajian Perubahan Pada Pasca Huni Pembangunan Perumahan Oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....	18
Tabel III.1.	Status Perkawinan Responden	49
Table III.2.	Komposisi Usia Responden	50
Tabel III.3.	Tingkat Pendidikan Responden	52
Tabel III.4.	Jenis Pekerjaan Responden	53
Tabel III.5.	Tingkat Pendapatan Keluarga	53
Tabel III.6.	Tingkat Pendidikan Anak.....	54
Tabel III.7.	Tingkat Kelayakan Hunian	56
Tabel III.8.	Perubahan Lantai Rumah	57
Tabel III.9.	Perubahan Tinggi Dinding Tembok.....	58
Tabel III.10.	Perubahan Tinggi Dinding Kamar Mandi.....	59
Tabel III.11.	Perubahan Kuda-Kuda dan Gording.....	61
Tabel III.12.	Perubahan Kaso dan Reng.....	62
Tabel III.13.	Perubahan Penutup Atap.....	63
Tabel III.14.	Perubahan Penutup Langit-Langit.....	64
Tabel III.15.	Rangkuman Perubahan Fisik Rumah.....	65
Tabel III.16.	Perubahan Tipe Rumah.....	67
Tabel III.17.	Perubahan Pendapatan Responden.....	69
Tabel IV.1.	Tingkat Perubahan Kualitas Lantai Rumah.....	70
Tabel IV.2.	Tingkat Perubahan Tinggi Dinding Tembok.....	71
Tabel IV.3.	Tingkat Perubahan Kualitas Rangka Atap.....	72
Tabel IV.4.	Tingkat Perubahan Tipe Rumah.....	75
Tabel IV.5.	Tingkat Perubahan Pendapatan.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Wilayah Administrasi Kota Surakarta	8
Gambar 1.2.	Peta Kelurahan Sangkrah.....	9
Gambar 1.3.	Kawasan Studi Setelah Ditata.....	10
Gambar 1.4.	Diagram Alur Kerangka Pemikiran Kajian Perubahan Pada Pasca Huni Pembangunan Perumahan Oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat serta martabat manusia. Namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, menurut Panudju (1999:3), karena pendapatan per bulannya di bawah persyaratan untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah dari BTN, maka rumah yang disediakan oleh Perum Perumnas dan perusahaan pengembang tidak mampu dijangkau oleh kekuatan ekonomi mereka. Untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, mereka terpaksa membangun gubug-gubug secara liar di daerah kumuh di berbagai bagian kota.

Komarudin (1997 : 88) mengungkapkan, penyebab timbulnya lingkungan liar yang kumuh, jorok dan tidak sehat antara lain adalah konsekuensi dari urbanisasi, migrasi yang tinggi, kota sebagai pusat perdagangan, semakin sempitnya lahan permukiman, semakin mahalnya harga tanah, dan kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah kota. Lingkungan kumuh menjadi semakin kumuh karena penghuninya berpenghasilan sangat rendah, belum tersedianya fasilitas umum seperti listrik dan air bersih karena status tanah yang tidak resmi, serta disebabkan oleh tidak adanya campur tangan pemerintah.

Lebih lanjut Komarudin mengemukakan, jika pertumbuhan lingkungan kumuh dibiarkan, maka derajat kesehatan masyarakat akan tetap rendah, mudah terjadi kebakaran, memberi peluang kriminalitas, terganggunya norma tata susila, tidak teraturnya tataguna tanah, dan sering menimbulkan banjir. Penggusuran lingkungan

kumuh tidak menyelesaikan masalah. Selain tidak manusiawi, para pemukim kembali menyerobot tanah terbuka lainnya, sehingga hilang satu tumbuh dua atau lebih lingkungan kumuh.

Latar belakang sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas mengisyaratkan pentingnya penyelesaian masalah permukiman liar dan kumuh di wilayah perkotaan dengan arif dan bijaksana. Seperti juga dikatakan oleh Panudju (1999 : 286) bahwa kepedulian dan pemihakan yang tulus terhadap masyarakat berpenghasilan rendah merupakan prasyarat penting untuk menyelesaikan masalah perumahan mereka.

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, pemerintah pusat telah melimpahkan tugas dan kewenangan kepada pemerintah kota dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengadaan lahan dan pembangunan prasarana untuk kebutuhan pengembangan perumahan, termasuk bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Namun Panudju berujar bahwa pada kenyataannya sebagian besar pemerintah kota tidak berusaha membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang disebabkan karena adanya masalah keterbatasan dana dan koordinasi yang dihadapi oleh pemerintah kota, disamping kurang kepedulian dan pemihakan penguasa setempat kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Persoalan sebagaimana dikemukakan di atas memberi gambaran bahwa peranan pemerintah kota dalam mengatasi masalah permukiman liar dan kumuh sangat penting. Yang menarik dari kasus penelitian ini adalah bahwa, sebagaimana termuat dalam *Data Pokok Untuk Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (1990 : 1-4)*, kawasan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah tidak digusur tetapi malah dilakukan konsolidasi lahan. Kapling-kapling diatur kembali, dibuatkan jalan lingkungan, drainase dan MCK Umum, dan penghuni membangun sendiri rumahnya

sesuai kemampuan ekonomi mereka masing-masing (yang rata-rata masih dibawah standar rumah sederhana yang layak dan sehat).

Kawasan seluas 0,35 hektar yang ditempati 110 kepala keluarga pemukim liar di Kelurahan Sangkrah tersebut pada awalnya merupakan bekas tempat pembuangan sampah milik swapraja. Karena lahan milik swapraja tersebut pada akhirnya terbengkelai dan tidak ada pengawasan dari pihak yang berwenang, maka pada akhirnya kawasan tersebut tumbuh permukiman liar. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Walikotamadya Surakarta nomor 660/8/1985 tentang Peningkatan Program Kota Yang Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah, maka setelah melakukan pendekatan dengan pihak swapraja kawasan tersebut diadakan program konsolidasi lahan. Pemerintah Kota Surakarta mengatur kembali kapling-kapling di kawasan tersebut, dibuatkan drainase, jalan lingkungan dan MCK Umum, kemudian penghuni membangun sendiri rumahnya sesuai kemampuan ekonominya.

Dalam era otonomi daerah saat ini, Pemerintah Kota dituntut memiliki kemandirian dan inovasi dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka membangun kesejahteraan seluruh warga kota, termasuk warga pemukim liar, maka apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan kasus yang menarik untuk diteliti, khususnya untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap kualitas fisik perumahan dan dampaknya terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi penghuni.

Dalam penelitian ini melibatkan sebuah kawasan yang termasuk padat di Kota Surakarta, yang keadaan sosial-ekonominya pun masuk kategori rawan, yakni masyarakatnya berpenghasilan rendah dan merupakan kawasan yang dulu dikenal sebagai sarang pencuri dan pelacur. Menurut data kependudukan yang dibuat oleh

Kantor Kelurahan Sangkrah pada bulan April 1996, wilayah Kelurahan Sangkrah mempunyai tingkat kepadatan penduduk 236 jiwa per hektar.

Berdasarkan pengamatan sepintas di kawasan tersebut, serta mempelajari laporan penelitian Panudju (dalam buku *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, 1999) di kawasan tersebut, beberapa pertimbangan yang melandasi pemilihan topik penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah telah memperlihatkan perubahan, menjadi lebih teratur dan bersih. Disamping itu kehidupan sosial mereka juga kelihatan lebih terbuka dan ramah;
2. Penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah hanya berfokus pada aspek fisik, yaitu penataan perumahan dan lingkungannya saja. Tidak menyentuh pada aspek pembinaan ekonomi penghuni;
3. Keterlibatan pemerintah kota dalam penyelesaian masalah permukiman liar dan kumuh dengan cara arif-bijaksana masih merupakan barang langka di Indonesia, sehingga kasus di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bahwa kepedulian dan keberpihakan terhadap permukiman liar dapat merubah kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan tidak kumuh;
4. Kasus di Kelurahan Sangkrah merupakan obyek penelitian yang menarik, untuk mengukur dampak dari penataan kawasan perumahan mereka terhadap perubahan fisik rumah, kondisi sosial dan ekonomi mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Menghadapi persoalan permukiman liar dan kumuh di wilayah perkotaan perlu disikapi dengan tindakan yang arif dan bijaksana, agar permasalahan sosial dan ekonomi di kawasan tersebut tidak bertambah parah. Kiranya perlu disadari bahwa

pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Oleh karena itu upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan konsolidasi lahan terhadap kawasan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah, perlu dicermati dampaknya terhadap perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi penghuni. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Sejauhmana perubahan kondisi fisik perumahan, sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan tersebut?”

1.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji perubahan fisik perumahan, kondisi sosial dan ekonomi penghuni, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut akibat pembangunan perumahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta.

1.3.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi kondisi fisik perumahan, sosial dan ekonomi penghuni, yang meliputi tingkat pendidikan, status sosial penghuni yang dilihat dari perubahan tipe rumahnya, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan;

- b. Menganalisis perubahan kondisi fisik rumah, yang membandingkan antara kondisi fisik rumah tahun 1990 dan tahun 2002;
- c. Menganalisis perubahan kondisi sosial-ekonomi penghuni;
- d. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akibat pembangunan perumahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta tersebut.

1.3.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dampak dari penataan permukiman liar dan kumuh di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah. Dampak dimaksud adalah perubahan fisik perumahan, sosial dan ekonomi penghuni.

Pengetahuan mengenai fenomena di atas, bagi pemerintah kota yang sedang menghadapi persoalan permukiman liar dan kumuh, diharapkan memberi pemahaman yang mendalam perihal manfaat penataan permukiman liar dan kumuh ditinjau terhadap perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi penghuni. Disamping itu, bagi Pemerintah Kota Surakarta itu sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk lebih menyempurnakan program pembangunan sejenis dimasa-masa mendatang, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah lebih meningkat lagi.

1.4. Ruang Lingkup

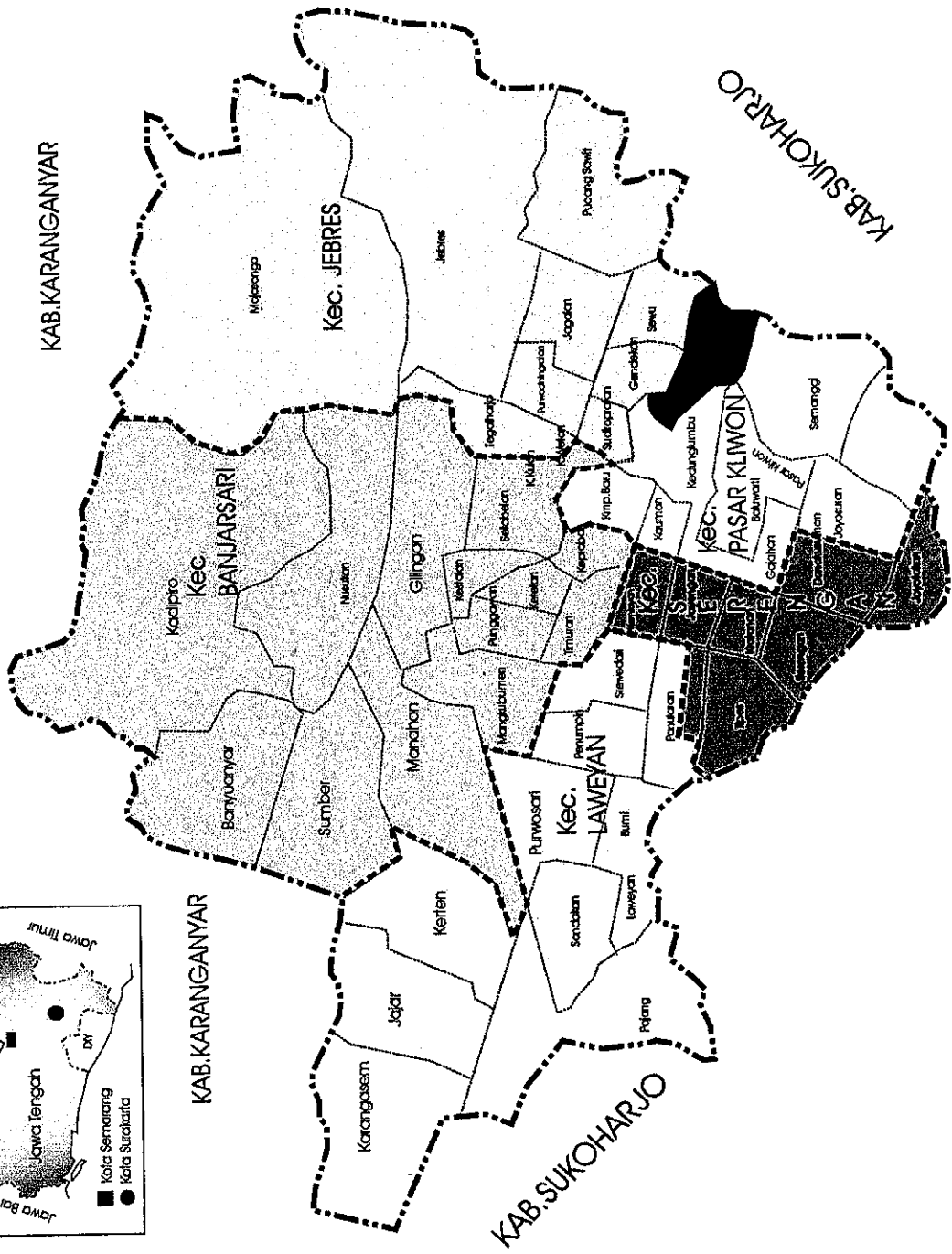
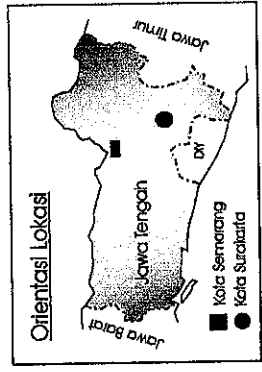
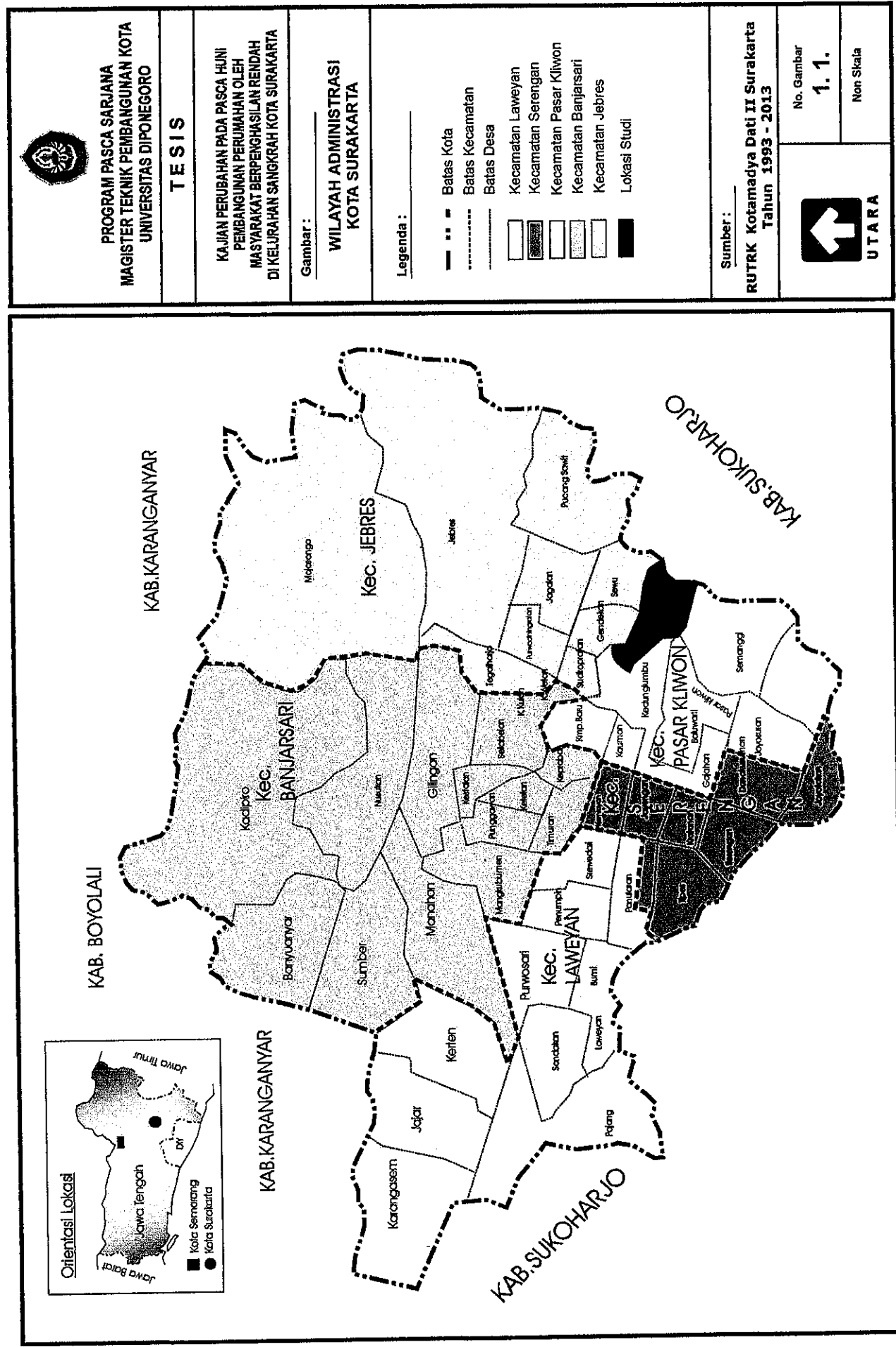
1.4.1. Ruang lingkup Materi










Dalam kerangka memperjelas dan mempersempit permasalahan pembangunan perumahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta, maka penelitian ini membatasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

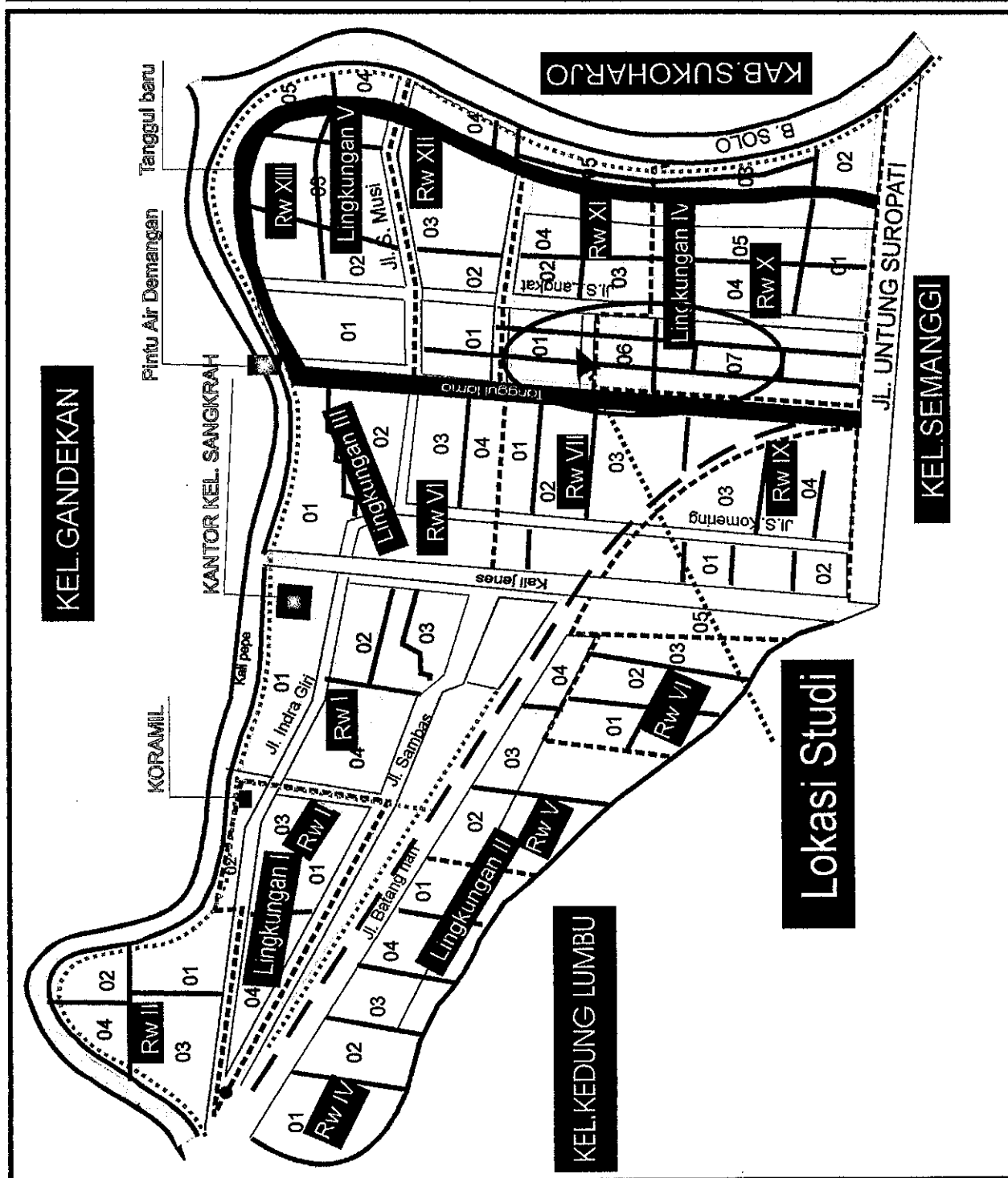
- a. Tinjauan terhadap hakekat pembangunan perumahan bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Tinjauan terhadap standar rumah sederhana yang layak dan sehat;
- c. Tinjauan mengenai karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di perkampungan;
- d. Tinjauan pengaruh penataan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan terhadap perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi penghuni.

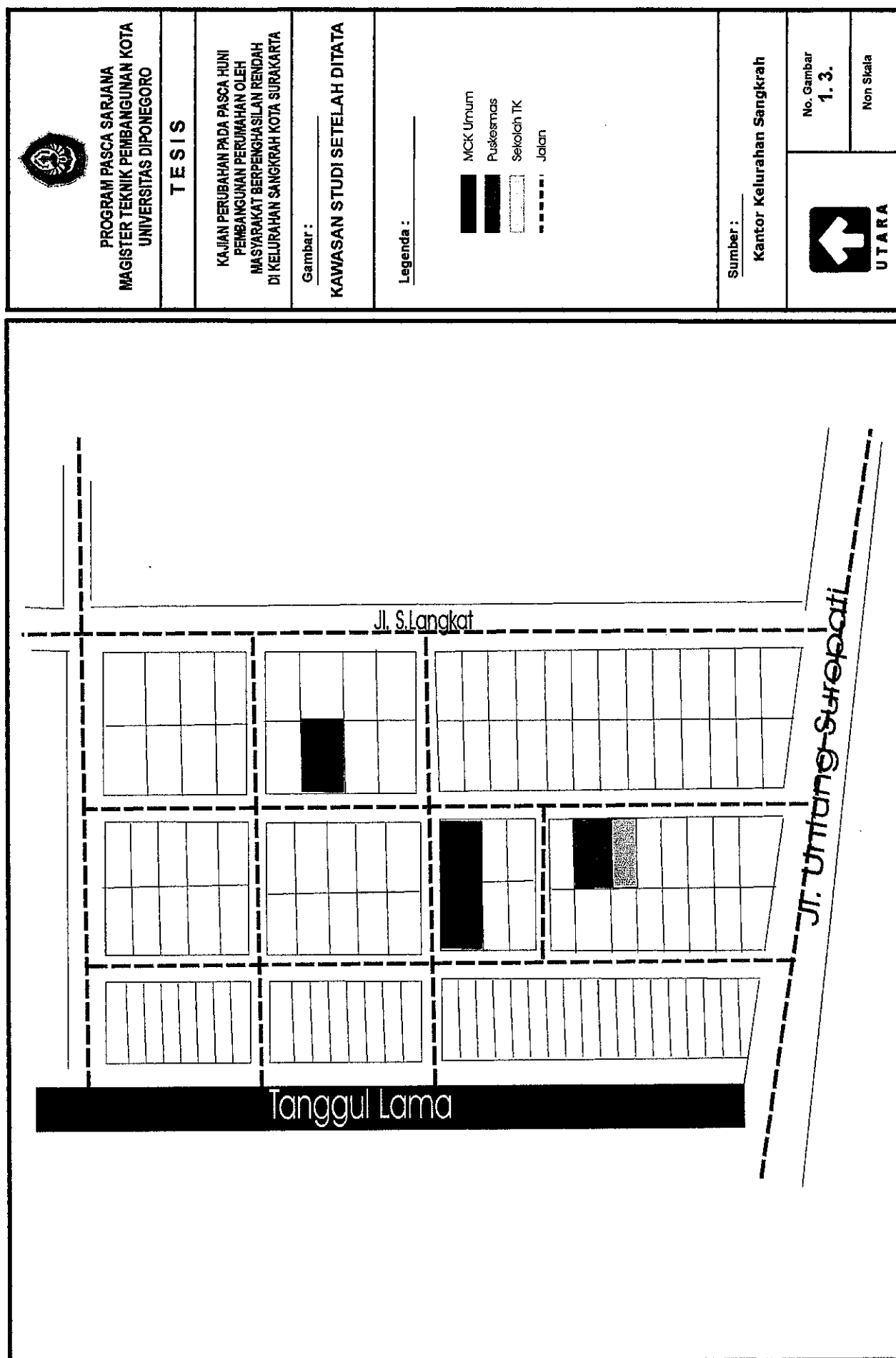
1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah kawasan penataan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah bekas pemukim liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Untuk lebih jelasnya, lingkup spasial dari studi ini ditunjukkan dalam gambar-gambar peta di halaman berikut ini.



 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	
<p>TESIS</p>	
<p>KAJIAN PERUBAHAN PADA PASCA HUNI PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH MASYARAKAT BERPENDAHASILAN RENDAH DI KELURAHAN SANGKRAH KOTA SURAKARTA</p>	
<p>Gambar :</p>	<p>KELURAHAN SANGKRAH</p>
<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">  Sungai  Jalan  Batas RT  Batas RW  Lingkungan I & IV  Lingkungan II & V  Lingkungan III  Lokasi Studi 	
<p>Sumber : Kantor Kelurahan Sangkrah</p>	
<p>No. Gambar 1.2.</p>	
<p>Non Skala</p>	





1.5. Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kota Surakarta pada sekitar tahun 1990-an telah melaksanakan konsolidasi lahan di bekas permukiman liar dan kumuh. Konsolidasi lahan tersebut meliputi kawasan seluas 0,35 hektar yang dihuni oleh 110 kepala keluarga di Kelurahan Sangkrah. Kapling-kapling penghuni diatur kembali, kemudian dibuatkan jalan lingkungan, drainase dan MCK Umum, selanjutnya penghuni membangun sendiri rumahnya sesuai kemampuan ekonomi mereka masing-masing (yang pada umumnya masih dibawah standar rumah sederhana yang layak dan sehat).

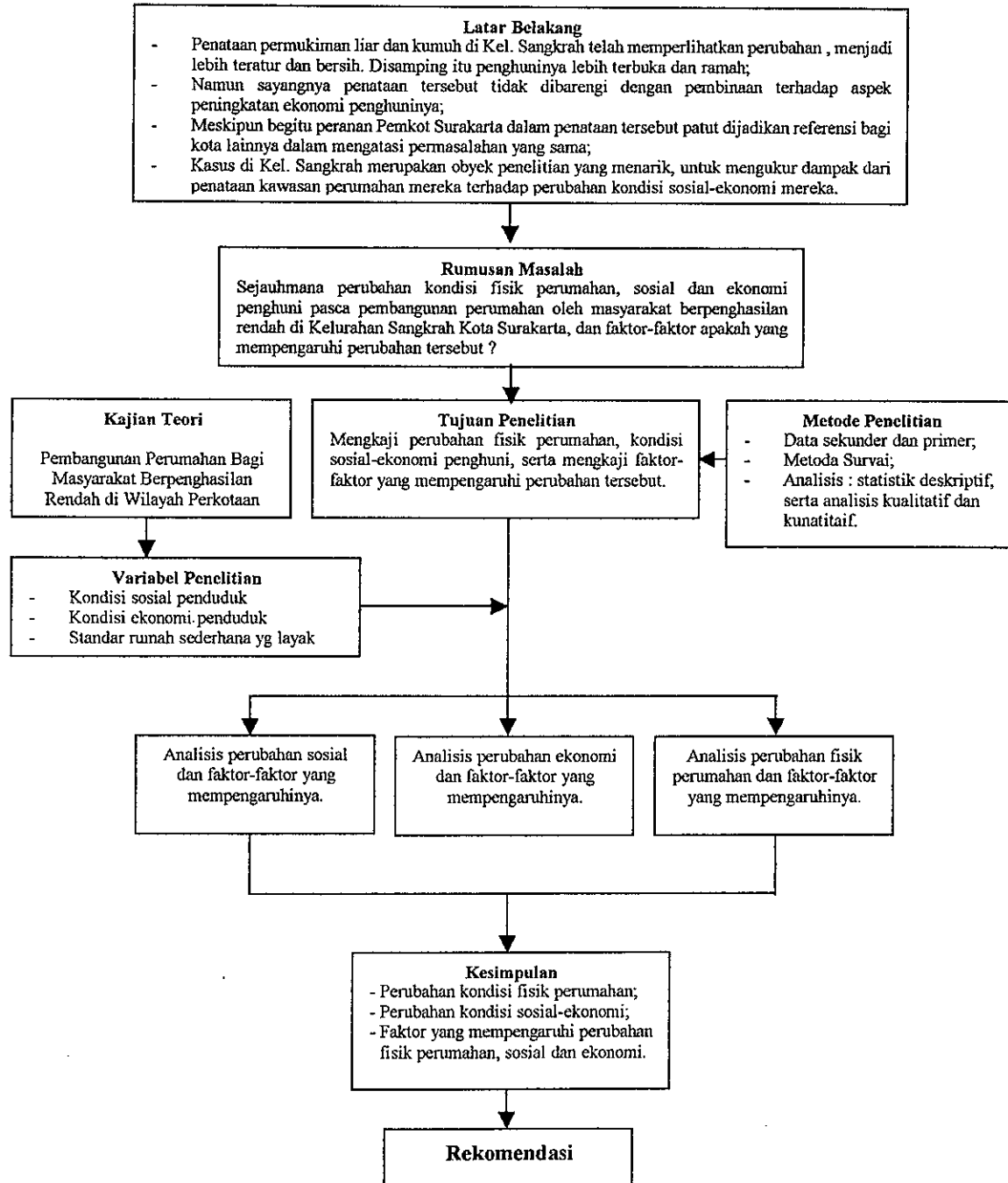
Kondisi pada tahun 2002 nampak terjadi perubahan. Kualitas fisik rumah penghuni rata-rata meningkat lebih baik, dan kondisi lingkungan permukiman terlihat bersih, rapi, sehat dan cukup hijau.

Sepertinya penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah tersebut telah memperlihatkan perubahan kondisi lebih baik. Untuk itu perlu diadakan kajian dalam rangka mengukur dampak dari penataan permukiman liar dan kumuh terhadap perubahan kualitas fisik rumah, sosial, dan ekonomi penghuni.

Untuk mendapatkan indikator yang lebih konkrit dan gambaran yang lebih jelas perihal fenomena perubahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian deskriptif. Metoda studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survai, dan teknik analisis yang dipakai adalah statistik deskriptif serta analisis kualitatif dan kuantitatif.

Diharapkan hasil penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah tersebut terjadi perubahan yang lebih baik, sehingga sesuai dengan fungsi dan peran pemerintah kota sebagai stimulator untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran Kajian Perubahan Pada Pasca Huni
Pembangunan Perumahan Oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta



1.6. Metoda Penelitian

1.6.1. Metoda Pendekatan

Penelitian dalam penulisan tesis ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Kata deskriptif berasal dari bahasa latin "*descriptivus*" yang berarti uraian. (Taliziduhu Ndraha, 1985:105, dalam Erna Widodo & Mukhtar, 2000:15).

Menurut Suharsimi Arikunto (1993 : 309)) yang dikutip oleh Erna Widodo & Mukhtar (2000 : 15–16) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap suatu perlakuan.

Bailey (1982, dalam Erna & Mukhtar 2000 : 17) menekankan bahwa penelitian deskriptif selain mendiskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendiskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut "mengapa" dan "bagaimana" tentang sesuatu yang terjadi.

Moh. Nazir (1999 : 63, dalam Erna & Mukhtar 2000 : 89) berpendapat tujuan dari penelitian deskriptif secara mikro adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Berkaitan dengan pendapat para pakar di atas, maka penelitian dalam tesis ini akan mendeskripsikan/menguraikan/menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

1.6.1.1. Tingkat Perubahan Fisik Rumah.

Tingkat perubahan fisik rumah akan ditinjau terhadap komponen lantai, dinding, dan rangka atap. Tinjauan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji perubahan mutu rumah penghuni setelah lingkungan permukiman mereka lebih teratur dan tidak liar lagi. Untuk mengukur tingkat perubahan fisik rumah tersebut akan diklasifikasikan sebagai berikut :

a). Lantai :

- Tingkat perubahan kualitas lantai yang masuk kategori "*sedang/cukup*" adalah perubahan lantai rumah penghuni ke kualitas "*plesteran semen-pasir*". Pertimbangannya karena kualitas plesteran semen-pasir merupakan persyaratan minimal lantai rumah sederhana yang layak;
- Tingkat perubahan kualitas lantai yang masuk kategori "*tinggi*" adalah perubahan lantai rumah penghuni ke kualitas "*tegel*". Pertimbangannya karena kualitas tegel telah melampaui persyaratan minimal lantai rumah sederhana yang layak;
- Tingkat perubahan kualitas lantai yang masuk kategori "*sangat tinggi*" adalah perubahan lantai rumah penghuni ke kualitas "*keramik*". Pertimbangannya karena kualitas keramik lebih baik dibanding tegel.

b). Dinding :

- Tingkat perubahan kualitas dinding tembok yang masuk kategori "*sedang/cukup*" adalah perubahan ke tinggi "*90 cm*". Pertimbangannya karena tinggi dinding tembok 90 cm merupakan persyaratan minimal rumah sederhana yang layak;

- Tingkat perubahan kualitas dinding tembok yang masuk kategori “tinggi” adalah perubahan ke tinggi “150 cm”. Pertimbangannya karena tinggi dinding tembok 150 cm telah melampaui persyaratan minimal rumah sederhana yang layak;
- Tingkat perubahan kualitas dinding tembok yang masuk kategori “sangat tinggi” adalah perubahan ke tinggi “300 cm”. Pertimbangannya karena telah mencapai kualitas rumah permanen.

c). Rangka Atap :

- Tingkat perubahan kualitas rangka atap yang masuk kategori “sedang/cukup” adalah perubahan ke kualitas “kayu”. Pertimbangannya karena kualitas kayu merupakan persyaratan minimal rangka atap rumah sederhana yang layak;
- Tingkat perubahan kualitas rangka atap yang masuk kategori “tinggi” adalah perubahan ke kualitas “besi-baja”. Pertimbangannya karena kualitas besi/baja telah melampaui persyaratan minimal rangka atap rumah sederhana yang layak;

1.6.1.2. Tingkat Perubahan Sosial.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat perubahan sosial penghuni indikatornya adalah perubahan tipe rumah. Sebab konteks perubahan sosial dalam penelitian ini adalah dampak dari pembangunan perumahan, oleh karena itu perubahan sosial yang relevan adalah tipe rumah penghuni karena berkaitan dengan status sosial. Sehubungan dengan tingkat perubahan tipe rumah penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah pasca pembangunan perumahan, maka klasifikasinya adalah sebagai berikut :

- a). Tingkat perubahan sosial yang masuk kategori "*sedang/cukup*" adalah perubahan rumah penghuni ke "*tipe 27*". Pertimbangannya karena tipe 27 memberi gambaran status sosial lebih baik dibanding tipe 18;
- b). Tingkat perubahan sosial yang masuk kategori "*tinggi*" adalah perubahan rumah penghuni ke "*tipe 36*". Pertimbangannya karena tipe 36 memberi gambaran status sosial lebih baik dibanding tipe 18 dan tipe 27;
- c). Tingkat perubahan sosial yang masuk kategori "*sangat tinggi*" adalah perubahan rumah penghuni ke "*tipe 45*". Pertimbangannya karena tipe 45 merupakan tipe terbesar di kawasan penataan tersebut.

1.6.1.3. Tingkat Perubahan Ekonomi.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat perubahan ekonomi penghuni indikatornya adalah perubahan pendapatan. Sehubungan dengan tingkat perubahan ekonomi, maka klasifikasinya adalah sebagai berikut :

- a). Tingkat perubahan ekonomi yang masuk kategori "*sedang/cukup*" adalah perubahan pendapatan penghuni ke tingkat antara "*Rp.250 ribu – Rp.500 ribu per bulan*";
- b). Tingkat perubahan ekonomi yang masuk kategori "*tinggi*" adalah perubahan pendapatan penghuni ke tingkat antara "*Rp.500 ribu – Rp.750 ribu per bulan*";
- c). Tingkat perubahan ekonomi yang masuk kategori "*sangat tinggi*" adalah perubahan pendapatan penghuni ke tingkat "*diatas Rp.750 ribu per bulan*".

1.6.2. Kebutuhan Data.

Hal yang paling penting dalam penelitian adalah adanya suatu data yang relevan, yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam rangka menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini. Data merupakan gambaran suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain dan peneliti hanya sebagai pemakai saja.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan metodologi dari penelitian ini maka data-data yang dibutuhkan adalah sebagaimana yang diuraikan secara ringkas dalam tabel 1.1. dibawah ini.

**Tabel 1.1. Kebutuhan Data
Kajian Perubahan Pada Pasca Huni Pembangunan Perumahan Oleh Masyarakat
Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta**

Unsur yang dilihat	Indikator	Parameter	Sumber data	Teknik analisis
Perubahan fisik rumah	Tingkat perubahan fisik rumah	a. Tingkat perubahan lantai ke kualitas : - plesteran semen-pasir, kategori sedang - tegel, masuk kategori tinggi - keramik, masuk kategori sangat tinggi b. Tingkat perubahan tinggi dinding tembok : - tinggi 90 cm, masuk kategori sedang - tinggi 150 cm, masuk kategori tinggi - tinggi 300 cm, kategori sangat tinggi c. Tingkat perubahan rangka atap ke kualitas : - kayu, masuk kategori sedang - besi/baja, masuk kategori sangat tinggi	Rumah Responden	Tabel Frekuensi Grafik
	Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik rumah	a. Hubungan faktor usia dengan perubahan fisik rumah b. Hubungan faktor pendidikan dengan perubahan fisik rumah c. Hubungan faktor pekerjaan dengan perubahan fisik rumah d. Hubungan faktor pendapatan dengan perubahan fisik rumah	Responden dan Rumah Responden	Tabulasi silang Statistik deskriptif
Perubahan sosial	Tingkat perubahan tipe rumah	Tingkat perubahan tipe rumah ke : a. Tipe 27, masuk kategori sedang b. Tipe 36, masuk kategori tinggi c. Tipe 45 sangat tinggi	Rumah Responden	Tabel Frekuensi Grafik
	Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tipe rumah	a. Hubungan faktor usia dengan perubahan tipe rumah b. Hubungan faktor pendidikan dengan perubahan tipe rumah c. Hubungan faktor pekerjaan dengan perubahan tipe rumah d. Hubungan faktor pendapatan dengan perubahan tipe rumah	Responden dan Rumah responden	Tabulasi silang Statistik deskriptif
Perubahan ekonomi	Tingkat perubahan pendapatan	Tingkat perubahan pendapatan ke : a. Antara Rp.250 – 500 ribu, kategori sedang b. Antara Rp.500 – 750 ribu, kategori tinggi c. Diatas Rp.750 ribu, kategori sangat tinggi	Pendapatan Responden	Tabel Frekuensi Grafik
	Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan	a. Hubungan faktor usia dengan perubahan pendapatan b. Hubungan faktor pendidikan dengan perubahan pendapatan c. Hubungan faktor pekerjaan dengan perubahan pendapatan	Responden dan Pendapatan Responden	Tabulasi silang Statistik deskriptif

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

1.6.3. Populasi Penelitian dan Cara Pengambilan Sampel.

Populasi penelitian adalah rumah tangga yang berada di kawasan pembangunan perumahan kota oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan izin pemerintah kota di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta. Atas dasar domisili, semua rumah tangga di kawasan pasca pembangunan tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel atau responden dalam penelitian.

Data dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Singarimbun (1989 : 3), yaitu penelitian sampel adalah penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi yang pada umumnya dikatakan sebagai penelitian survei.

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metoda *purposive sampling*. Dengan cara pengambilan sampel seperti ini, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria penghuni yang dari awal bertempat tinggal di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah.

Penentuan jumlah sampel, menurut Arikunto (1996:119), dapat ditentukan dengan pertimbangan :

- a. kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana;
- b. sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data yang hendak diperoleh;
- c. besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.

Banyak rumus yang dipergunakan untuk menentukan jumlah sampel, salah satunya menurut Frank Lynch adalah rumus:

$$n = \frac{N Z^2 \cdot p (1-p)}{N d^2 + Z^2 \cdot p (1-p)}$$

Dimana:

n	= ukuran sampel
N	= populasi
Z	= nilai normal variabel (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95% (0,95)
p	= harga patokan terbatas (0,50)
d	= sampling error dalam pengambilan sampel (10% = 0,10)

Dengan rumus tersebut, berdasarkan jumlah populasi 110 KK diperoleh jumlah sampel sebanyak = **51 Kepala Keluarga** yang sekaligus menjadi responden penelitian.

1.6.4. Analisis Data.

1. Analisis Tingkat Perubahan Fisik Perumahan, Sosial dan Ekonomi

Analisis ini ditujukan untuk memberi gambaran mengenai tingkat keberhasilan penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah dalam merubah fisik rumahnya, serta memberi gambaran dampak penataan tersebut terhadap perubahan sosial dan ekonomi penghuni. Adapun alat analisis untuk mengkaji tingkat perubahan tersebut adalah seperti yang telah dibahas pada sub bab metoda pendekatan di muka.

2. Teknik Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Fisik Rumah, Sosial dan Ekonomi

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi responden merupakan analisis Chi - Kuadrat (X^2) dan Koefisien Kontingensi (C) dengan program SPSS. Analisis tersebut merupakan analisis statistik yang menganalisis hubungan antara variabel *independent* yaitu faktor usia, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan responden dengan variabel *dependent*, yaitu perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi.

Ada tidaknya hubungan faktor-faktor yang terdapat didalam variabel *independent* diatas dengan perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi responden dapat diketahui dari harga Chi – Kuadrat (X^2). Apabila terbukti terdapat hubungan yang

signifikan, maka faktor-faktor dalam variabel *independent* tersebut diatas adalah yang mempengaruhi perubahan fisik rumah, sosial, dan ekonomi responden di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah. Kemudian, sejauhmana kekuatan hubungan tersebut diatas, dapat diketahui dari harga Koefisien Kontingensi (C). Lebih rinci mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik rumah, sosial, dan ekonomi responden dapat dilihat pada lampiran.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum laporan tesis ini, maka akan diuraikan secara ringkas sistematika penulisan tesis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan penelitian ini, mengapa persoalan yang diangkat dalam penelitian ini menarik untuk diteliti, apa tujuan, sasaran, dan manfaat dari penelitian ini, serta bagaimana metode penelitiannya.

BAB II KAJIAN TEORI : Bab ini merupakan studi literatur yang difokuskan pada kajian mengenai pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Studi literatur ini dimaksudkan untuk mencari jawab secara teoritis terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Dan dari studi literatur inilah tolok ukur atau standar untuk mengevaluasi fenomena yang terjadi di lapangan didapat.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH STUDI : Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum kota Surakarta dan gambaran umum kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah. Uraian dan ilustrasi yang berbentuk gambar peta lokasi dalam bab ini, diharapkan memperkuat deskripsi persoalan mengenai pembangunan perumahan bagi pemukim liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN : Bab ini merupakan inti dari laporan tesis ini. Secara sistematis data-data hasil survai lapangan diorganisir atau dikemas untuk menampilkan deskripsi tentang fenomena kasus penelitian ini, dan selanjutnya secara kritis akan di analisis sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang sangat terkait dan khas kawasan penataan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta.

BAB V PENUTUP : Bab penutup ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk memberi jawaban terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun rekomendasi adalah merupakan bahan masukan bagi persoalan sejenis di wilayah lain, sehingga diharapkan dalam kesempatan lain hasil penataan permukiman liar dan kumuh di wilayah perkotaan lebih optimal, lebih sempurna dan lebih baik lagi.

BAB II

PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI WILAYAH PERKOTAAN

2.1 Perumahan Adalah Proses

Kajian terhadap pengertian “perumahan adalah proses”, akan membawa kepada pemahaman yang mendalam bahwasannya kualitas rumah berbanding lurus dengan kemampuan ekonomi seseorang atau sebuah keluarga. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Yudohusodo (1991) bahwa masyarakat miskin di kota ternyata mampu membangun rumahnya sendiri dengan proses bertahap, mula-mula dengan bahan bangunan bekas atau sederhana tetapi lambat laun diperbaikinya menjadi bangunan berkualitas baik, permanen bahkan beberapa rumah telah bertingkat. Yudohusodo berpendirian bahwa ada potensi swadaya di masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun demikian, masih ada beberapa hal mengenai segi-segi lain tentang masyarakat kurang mampu ini yang perlu mendapat perhatian. Ada banyak kemampuan yang tidak dimiliki masyarakat miskin, disamping potensi swadaya mereka yang positif. Yang tidak dimilikinya adalah kemampuan untuk mendapatkan kepastian atas tanahnya (*security of tenure*). Yudohusodo berpendapat bangunan-bangunan rumah yang dibiarkan kumuh atau tidak diperbaiki, ternyata sebagian besar disebabkan pula karena ketidakpastian akan hak atas tanahnya, sehingga mereka itu selalu dihantui ketakutan bahwa mereka sewaktu-waktu terkena gusur atau diharuskan pindah. Masyarakat inipun tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakan sendiri prasarana fisik lingkungan seperti saluran drainase, air bersih, sanitasi lingkungan dan sebagainya. Disamping itu tidak

memiliki kemampuan untuk mengusahakan agar lingkungan perumahannya terencana dengan baik.

Pemahaman bahwa “perumahan adalah proses” juga dikemukakan Budihardjo, dalam *Arsitektur & Kota di Indonesia* (1997), bahwa pada dasarnya membangun rumah adalah merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh pribadi, keluarga atau masyarakat sendiri. Namun sekarang ini pembangunan perumahan telah menjadi suatu kegiatan industri yang sangat kompleks dan canggih, yang dianggap sekedar sebagai komoditi, sebagai produk akhir barang jadi, sebagai *shelter*. Dimana aspek-aspek sosial budaya, kesejahteraan ekonomi, tata nilai dan perilaku manusianya lepas dari pengamatan. Menurut Budihardjo, wawasan terlalu ditekankan pada pencapaian target fisik dan kuantitas pengadaan rumah dengan perencanaan model prototip, menggunakan komponen bangunan produk teknologi mutakhir yang serba *prefab* dan standar, tanpa mempedulikan keunikan dan potensi lokal. Sehingga beliau mengingatkan bahwa perumahan merupakan proses kegiatan membangun secara evolusioner, menerus dan *incremental*. Samasekali bukan suatu hasil akhir yang mandeg. Pada akhirnya Budihardjo menekankan perlunya memberikan kesempatan/peluang bagi setiap keluarga untuk dapat mengejawantahkan diri, berkreasi sarat dengan inovasi, merencana dan membangun rumahnya dengan penuh keluwesan agar selalu tanggap terhadap setiap perubahan.

Lebih spesifik berkaitan dengan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan, Sudaryono dalam makalahnya yang berjudul *Konsep Kemitraan Dalam Pembangunan Perumahan* (1997) mengungkapkan bahwa perumahan yang “layak” memang relatif dan kontekstual. Menurutnya yang terpenting dari perumahan adalah “*what it does*” dan bukannya “*what it is*”, maka kondisi “layak” merupakan kondisi yang selalu berubah pada arah yang lebih baik. Dalam situasi keterbatasan dana yang

dimiliki oleh pemerintah, maka pengertian “layak” dapat diartikan sebagai “realistik” atau “terjangkau” (*affordable*) oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pengertian “layak”, tidak harus semuanya tersedia dan terpenuhi. Dimulai dari yang paling dasar, yakni prasarana, seperti air bersih, drainasi, sanitasi, listrik dan jalan, ditambah rumah dengan ukuran minimal dengan kualitas sederhana, sudah dapat dikatakan layak. Seiring dengan waktu dan meningkatnya kemampuan ekonomi penghuni, maka “kelayakan” baik secara kuantitatif (luas ruang) maupun kualitatif (bahan bangunan) akan berubah menuju keadaan yang lebih baik. Hasil survei yang dilakukan di proyek RSS di beberapa kota di Jawa menunjukkan bahwa sebagian besar unit Rumah Sangat Sederhana (RSS) telah dikembangkan oleh pemiliknya baik dalam hal luas lantai bangunan, penggantian bahan bangunan, maupun perubahan desain atau bentuknya. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 65% unit rumah yang telah dikembangkan. Yang sedang dalam proses pengembangan terdapat kurang lebih 3 % dan yang belum dikembangkan sama sekali terdapat 32%.

Budihardjo (1993), dalam Kota Berwawasan Lingkungan mengemukakan, dari pengalaman beliau menggeluti permukiman gelandangan yang diprakarsai Yayasan Sosial Sugiyapranata di Semarang, menunjukkan bahwa kaum papa memiliki potensi terpendam dalam pembangunan perumahan dan lingkungan binaan. Rasa kebersamaan dalam penderitaan telah menumbuhkan semangat swadaya dan gotong royong yang mempesona. Bila diperbandingkan kualitas sarana-prasarana lingkungan permukiman gelandangan makin lama makin meningkat, sedangkan pada beberapa lingkungan *real estate* kelas menengah yang terjadi justru sebaliknya. Kualitas lingkungan semakin menurun karena kurangnya rasa memiliki dari para penghuninya.

Selanjutnya, dalam penelitiannya mengenai Pola Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kampung Cibangkong Bandung, Pontoh



(1993) mengidentifikasi ada 5 (lima) indikator usaha dan tindakan penghuni memperbaiki dan membangun rumahnya, yaitu :

- a. **Perombakan** : perubahan struktur fisik rumah secara total (bentuk, bahan, jumlah ruang dan ukuran); *menunjukkan usaha perbaikan yang tinggi*;
- b. **Penyempurnaan** : peningkatan mutu bahan lantai, dinding dan atap secara menyeluruh tanpa mengubah jenis, jumlah dan bentuk rumah; *menunjukkan usaha perbaikan yang tinggi*;
- c. **Ekspansi/Perluasan** : perluasan ke arah luar, misalnya penambahan dapur, kamar, kamar mandi, dan sebagainya; *menunjukkan usaha perbaikan sedang*;
- d. **Penyempurnaan sebagian** : peningkatan mutu bahan sebagian rumah, misalnya peningkatan mutu bahan dinding atau lantai ruang tamu; *menunjukkan usaha perbaikan rendah*;
- e. **Pemeliharaan** : usaha mengatasi berbagai kerusakan, tanpa perubahan dan peningkatan mutu bahan, misal menambal atap yang bocor, mengganti pintu yang lapuk, pengecatan, dan sebagainya; *menunjukkan usaha perbaikan rendah atau dianggap tidak ada perbaikan*.

Panudju (1999 : 287) berpendapat bahwa masyarakat berpenghasilan rendah mampu mendanai pengadaan perumahannya sendiri yang layak huni, sekiranya ada yang membimbing, mengarahkan dan membantu menyediakan kapling dan prasarannya. Yang terpenting, siapapun yang membantu atau “*enabler*” di tingkat lokal, apakah Pemerintah Kota, Kelurahan, Koperasi, ataupun yayasan sosial harus mempunyai kepedulian dan pemihakan yang tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam pembangunan perumahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan, Panudju (1997 : 301) menekankan perlunya diwujudkan dalam bentuk

kerja sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pelaku. Kunci utama keberhasilan sistem ini terletak pada pelaksanaan pengadaan perumahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di tingkat lokal. Dalam pelaksanaannya masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat memecahkan semua hambatan-hambatan yang dihadapi. Agar sistem ini dapat berhasil, diperlukan adanya usaha pemerintah kota untuk menciptakan iklim yang kondusif dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah di tingkat lokal.

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan sangat memerlukan bantuan pengadaan kapling siap bangun dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekiranya tidak tersedia kapling siap bangun, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan bantuan untuk mendapatkan lahan, pembuatan rencana tapak, dan pengadaan prasarana. Penentuan ukuran kapling dan standar prasarannya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, sehingga tidak perlu diseragamkan untuk semua daerah. Meskipun ada bantuan dari pihak lain, dalam pelaksanaannya masyarakat berpenghasilan rendah harus terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses pengadaan kapling dan prasarannya. (Panudju, 1999 : 305-306).

Berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah mampu membuat rancangan rumah dan melaksanakan pembangunan fisik rumahnya, sehingga tanggung jawab pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dapat sepenuhnya diserahkan kepada anggota masyarakat yang bersangkutan. Masalah yang seringkali dihadapi oleh masyarakat adalah sulitnya mendapatkan izin bangunan. Hal ini karena masalah peraturan bangunan dan prosedur pengurusan izin bangunan. Karena keterbatasan dana, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu membangun rumah sesuai dengan standar yang

ditentukan dalam peraturan bangunan. Namun secara bertahap mereka akan mampu memenuhi persyaratan tersebut. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mendapatkan izin bangunan yang diperlukan. Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan adanya peraturan bangunan “sementara” yang disesuaikan dengan kemampuan awal masyarakat berpenghasilan rendah. (Panudju, 1999 : 306).

Dari pandangan para ahli diatas, nampaknya perumahan dengan status yang jelas (resmi/mendapat izin dari pemerintah kota) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan menempati posisi strategis dalam kehidupannya, dimana apabila mereka diperhatikan dan dibantu akan menjadi modal dasar bagi mereka untuk berkembang lebih baik. Jadi tingkat perubahan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan berkaitan erat dengan perkembangan kemampuan ekonomi mereka. Padahal menurut Sobirin (2001), dalam Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus, mengutip Manning & Effendi (1996), mengemukakan bahwa tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah serta pola hidup pedesaan yang sulit berubah mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok penduduk yang secara ekonomis kurang mampu atau penduduk miskin dan pengangguran kota.

Dari uraian diatas kesimpulannya adalah bahwa, bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan faktor tingkat pendidikan dan ketrampilan/pekerjaan akan menentukan tingkat perubahan kualitas perumahan mereka.

2.2. Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Perumahan adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang sifatnya struktural,, demikian Yudohusodo (1991) berpendapat. Yang dimaksud beliau adalah bahwa perumahan merupakan bagian dari peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Yudohusodo menekankan bahwa pembangunan perumahan bukan

hanya berupaya untuk mencapai sasaran kuantitatif saja, tetapi juga yang sangat penting adalah memperhatikan pencapaian sasaran kualitatif. Yang dimaksud beliau dengan sasaran kualitatif adalah aspek peningkatan sosial-ekonomi penghuni pasca pembangunan perumahan.

Hal yang sama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, Budihardjo (1997) mengemukakan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman merupakan prakondisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut beliau produktivitas manusia terutama sekali tergantung pada tersedianya wadah yang memadai untuk bekerja, beristirahat sekeluarga dan bermasyarakat.

Sependapat dengan Yudohusodo dan Budihardjo, Silas (1997) juga mengemukakan bahwa perumahan berfungsi sebagai sarana yang penting untuk pengembangan mobilitas dari aspek sosial-ekonomi penghuninya. Yang dimaksud Silas adalah bahwa perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan mempunyai arti yang penting bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Sebagaimana juga dikemukakan Komarudin (1997 : 46) bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat serta martabat manusia.

Jadi dari pandangan para ahli diatas jelas berpendirian bahwa pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan akan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi penghuninya. Sebagaimana pandangan Supardi (1994 : 211) bahwa tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah memperbanyak mutu hidup manusia. Menurut beliau pembangunan adalah sebuah proses yang memungkinkan manusia menyadari potensi mereka, membangun rasa percaya diri mereka, dan masuk ke kehidupan yang bermanfaat dan berkecukupan.

Potensi masyarakat berpenghasilan rendah di kampung-kampung di wilayah perkotaan haruslah senantiasa menjadi dasar filosofi pembangunan sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Sebagaimana Jellinek (1995) berpendapat bahwa seringkali penduduk kampung mempunyai gagasan yang berbeda dengan para perencana kota. Penduduk kampung menganggap kampung sebagai sarang kegiatan yang sibuk dan tempat harapan, batu loncatan ke arah standar kehidupan yang lebih baik. Sedangkan para perencana kota menganggapnya sebagai daerah kumuh yang penduduknya terjatuh dalam lingkaran setan kemiskinan.

Lebih lanjut Jellinek mengatakan bahwa golongan miskin di perkotaan memandang lingkungannya sebagai kampung halaman. Mereka telah mendiami selama bertahun-tahun dengan membangun dan memperbaiki rumah mereka secara berhati-hati dari bahan-bahan apapun yang dapat mereka peroleh di tempat sampah atau dibeli. Penduduk kampung tidak terlalu khawatir akan standar rumah-rumah mereka yang rendah atau kurang fasilitas, yang mereka khawatirkan justru biaya tambahan untuk fasilitas-fasilitas perumahan lainnya, karena diluar jangkauan kemampuan ekonomi mereka, sebab mereka tidak dapat memastikan jumlah pendapatan tiap bulannya. Disinilah esensi pentingnya kepedulian dan keberpihakan dari pemerintah kota untuk membantu mengadakan dan memperbaiki prasarana perumahan mereka, agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu berkembang menuju masyarakat *urban*.

Hakekat dari pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan adalah kepedulian dan keberpihakan dari pemerintah kota, maka mereka dapat memperbaiki kualitas kehidupannya. Sebagaimana Jellinek mengemukakan bahwa jika penduduk miskin diberi kesempatan maka mereka dapat maju, tetapi jika mereka tidak diberi kesempatan maka mereka tidak dapat berkembang dengan baik. Jellinek

memberi ilustrasi tentang potensi penduduk miskin di wilayah perkotaan sebagai berikut, selama tahun 1950-an dan tahun 1960-an tidak sulit bagi penduduk kampung untuk memperoleh pekerjaan dan mereka dapat berkembang cepat. Dengan adanya ledakan ekonomi pada awal tahun 1970-an, penduduk kampung menikmati kemakmuran. Pada prinsipnya apabila ada kesempatan bagi penduduk kampung untuk berkembang maka aspirasi-aspirasinya akan timbul dan enerjinya tampak meningkat. Menurut Jellinek, penduduk kampung percaya bahwa dengan ketekunan dan kerja keras, mereka dapat memperbaiki kehidupannya.

Jellinek (1995 : 255) mengungkapkan ada empat faktor yang mempengaruhi nasib penduduk kampung, dan yang relevan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada kualitas fisik perumahannya, yaitu :

1. Keteraturan dan besarnya pendapatan yang mereka terima;
2. Pendidikan dan keahlian orang tua, kerja keras, tekun, dan cerdas;
3. Kemampuan untuk mengatur anggaran belanja;
4. Tingkat pendidikan anak dan kesediaan mereka untuk membantu orang tua;

Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dapat berperan sebagai *stimulant* sekaligus dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Sebagaimana Budiharjo (1993) mengemukakan bahwa pada dasarnya perumahan merupakan kebutuhan sosial dan dapat berperan sebagai instrumen pembangunan yang aktif dan dinamis. Menurut Budihardjo perkembangan pemahaman tentang makna perumahan sebagai instrumen pembangunan, akan membawa serta fungsi-fungsi baru yang tidak sekedar hanya bertujuan untuk pengadaan papan saja, melainkan juga menggairahkan semangat membangun, serta menumbuhkan motivasi untuk kegiatan swadaya masyarakat.

Jadi dari pandangan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.3. Standar Rumah Sederhana Yang Layak & Sehat

Terdapat batasan-batasan tertentu untuk mengklasifikasikan bahwa suatu rumah memenuhi syarat sebagai tempat hunian, tentunya batasan-batasan tersebut dalam rangka memberi keamanan, kenyamanan, kesehatan dan kesejahteraan penghuni. Berkaitan dengan hal tersebut Yudohusodo (1991 : 13) berpendapat bahwa tempat tinggal yang layak tidak hanya sekedar atap sebagai tempat berlindung seseorang saja, akan tetapi juga agar dapat dinikmati kebebasan pribadi, luas lantai yang cukup, rasa aman yang cukup, penerangan dan ventilasi yang cukup, lokasi yang dekat tempat kerja dan fasilitas umum lainnya yang memadai.

Pendapat lain berkaitan dengan standar rumah sederhana yang layak & sehat, Budiardjo (1997) mengemukakan tentang pedoman pokok bangunan perumahan sebagai berikut :

1. Interior dan eksterior rumah harus mencerminkan nilai-nilai dan tatacara hidup penghuninya;
2. Setiap rumah sedapat mungkin memiliki kamar mandi, WC dan tempat cuci sendiri yang memenuhi persyaratan kesehatan;
3. Ukuran rumah dan pekarangan harus diperhitungkan atas dasar jumlah anggota keluarga dan kemungkinan pertumbuhannya;
4. Setiap rumah paling tidak harus terbuka ke kedua arah agar dapat penghawaan silang dan pencahayaan alamiah;
5. Setiap rumah harus meiliki taman sendiri;

6. Batas pemilikan rumah/pekarangan harus cukup jelas dibedakan dari daerah publik.

Komarudin (1997 : 118) mengemukakan pendapatnya bahwa, rumah di lingkungan kampung harus bisa multi fungsi, baik sebagai tempat tinggal, tempat pembinaan keluarga, tempat bekerja, tempat kegiatan keluarga, dan menentukan produktivitas keluarga. Untuk itu Komarudin berpendapat bahwa lingkungan tertib, sehat, nyaman, dan aman sangat di idam-idamkan. Komarudin menyarankan rumah-rumah di lingkungan habitat kampung harus diarahkan dan dipelihara agar memenuhi persyaratan rumah sehat, yaitu :

- ☐ Sehat dari segi kesehatan, antara lain : cukupnya penerangan dan perangan, penyediaan air bersih, pengaturan pembuangan air limbah dan sampah (tidak menimbulkan pencemaran), tidak lembabnya bagian-bagian ruang seperti lantai dan dinding, serta terhindar dari pengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor, udara kotor, kebisingan dan sebagainya;
- ☐ Sehat dari segi kekuatan bangunan, ditunjukkan oleh konstruksi bangunan yang cukup kuat (walaupun menggunakan bahan bangunan lokal, bekas, dan sederhana), terhindar dari ancaman angin dan hujan, dan terhindar dari pengaruh kebakaran;
- ☐ Segi kenyamanan rumah perlu diwujudkan oleh penyediaan ruangan yang mencukupi, ukuran ruangan yang disesuaikan dengan kegiatan penghuninya, penataan ruang sempit tetapi produktif, dekorasi dan warna ruangan serasi sesuai kemampuan, penghijauan halaman dengan pot bunga dan tanaman hias yang murah. Komarudin menyebutkan standar rumah sehat adalah 12 m² per orang (18 m² untuk 2 orang, 27 m² untuk 3 orang, dan seterusnya).

Dalam bagian lain, Komarudin (1997 : 152) mengemukakan bahwa Rumah Sangat Sederhana (RSS) harus memenuhi persyaratan kesehatan. Ini berarti RSS harus merupakan

rumah sehat. Spesifikasi bahan bangunan harus memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI). Ukuran vertikal maupun horizontal harus berpedoman kepada Koordinasi Modular. Luas bangunan yang disediakan sekurang-kurangnya 12 m^2 dan seluas-luasnya 36 m^2 . Ventilasi harus menjamin sirkulasi udara bersih dan penerangan alami maupun buatan harus disediakan sesuai kebutuhan.. Pembuangan air limbah keluarga tidak boleh mencemari yang lain dan harus menyambung ke pembuangan air limbah lingkungan. Setiap rumah harus menyediakan tempat sampah rumahtangga. Bahan bangunan lokal digunakan untuk konstruksi. Permukaan lantai harus rata dan lebih tinggi 20 cm dari halaman tertinggi, kering, mudah dibersihkan, tidak menimbulkan debu dan dapat diperkeras (tanah dilapisi air semen atau *soil cement* dan *tras*). Dinding dapat dibuat agar melindungi penghuni dari terik matahari, antara lain anyaman bambu yang dipasang 90 cm di atas dinding dengan bahan tembok. Tinggi dinding dapur, kamar mandi dan kakus dengan bahan tembok sekurang-kurangnya 150 cm. Kerangka atap harus mempunyai kekuatan menahan beban sendiri dan beban lantai, didukung antara lain dari bahan kayu atau bambu. Penutup atap disesuaikan dengan kekuatan kerangka atapnya, antara lain genteng plentong, keramik rakyat, seng gelombang atau asbes gelombang. Langit-langit dapat ditiadakan dengan membuat kerangka atap dan penutupnya lebih rapi.

Sementara itu berdasarkan Pedoman Teknik Rumah Sederhana Tidak Bersusun (SK Menteri PU No.20/Kpts/1986), yang dikutip oleh Komarudin (1997 : 301-302) menyebutkan luas lantai maksimal 36 m^2 , ada aliran listrik, air bersih minimal dari sumur, lantai rumah diberi perkerasan untuk memudahkan pembersihan dan mengurangi kelembaban, khusus lantai kamar mandi dari plesteran semen pasir, bahan penutup dinding minimal dari anyaman bambu (bilik) yang dipasang di atas dinding serta setinggi minimal 90 cm dari muka lantai, dinding kamar mandi dibuat dari pasangan tembok dinding kapur

dilapis bahan tahan api (minimal sampai ketinggian 150 cm dari muka lantai). Rangka atap dari kuda-kuda dan gorden kayu, kaso dan reng boleh dari bambu, penutup atap dari asbes semen gelombang, seng gelombang atau genteng sederhana, tidak perlu dipasang penutup langit-langit, luas kapling minimum 54 m² dan maksimum 200 m².

Kemudian UNCHS (dalam Komarudin 1997 : 302) menetapkan sebelas persyaratan rumah sehat, yaitu :

1. Proteksi terhadap penyakit yang dapat menular;
2. Proteksi terhadap kecelakaan dan gangguan pencemaran pada peralatan rumah tangga, polusi udara, zat kimiawi dan bangunan rumah untuk tempat kerja;
3. Promosi kesehatan mental;
4. Penciptaan kesehatan lingkungan permukiman;
5. Promosi kebersihan rumah dan lingkungan yang mendorong penghuni untuk selalu menjaga kesehatan keluarga;
6. Penciptaan keamanan lingkungan dan upaya peniadaan gangguan terhadap ibu, wanita dan anak-anak;
7. Penciptaan kesehatan sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dan swasta;
8. Penciptaan kesehatan yang selalu dikaitkan dengan daya dukung tanah, ruang terbuka dan lingkungan;
9. Rumah merupakan wadah proses pengembangan sosial ekonomi;
10. Pendidikan kesehatan umum dan profesi hendaknya secara langsung mendorong upaya penciptaan rumah sehat; dan
11. Partisipasi masyarakat harus diwujudkan dalam proses pembangunan perumahan sehat dalam lingkungan yang sehat.

2.4. Pengaruh Perubahan Fisik Perumahan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penghuni

Yudohusodo (1991 : 1) mengemukakan bahwa perumahan dan permukiman mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Di dalam masyarakat Indonesia, perumahan merupakan pencerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Lebih lanjut Yudohusodo mengatakan ada ungkapan di masyarakat Indonesia yang berbunyi : "*Rumahmu, Wajahmu dan Jiwamu*". Dari ungkapan tersebut Yudohusodo berpendapat keadaan perumahan di suatu tempat mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian dan peradaban manusia penghuninya.

Berkaitan dengan taraf hidup, kesejahteraan dan peradaban sebagaimana dikemukakan Yudohusodo di atas, maka untuk menilai hal tersebut Koentjaraningrat (1990 : 166-167) menggolongkan sebagai berikut :

- ☐ Aspek kekerabatan;
- ☐ Pekerjaan & tingkat pendapatan;
- ☐ Tingkat pendidikan;
- ☐ Fasilitas pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- ☐ Aspek keindahan;
- ☐ Aspek keagamaan;
- ☐ Organisasi kemasyarakatan;
- ☐ Fasilitas kesehatan dan kenyamanan hidup.

Kriteria sebagaimana disebutkan Koentjaraningrat di atas akan mencerminkan kondisi taraf hidup, kesejahteraan dan peradaban suatu komunitas masyarakat.

Kemudian dalam tulisannya yang berjudul "*Permukiman Marjinal Amat Liat*", Silas (dalam Kampung Surabaya Menuju Metropolitan 1996 : 514) mengemukakan penghuni

permukiman marginal menganggap penting pendidikan bagi anak-anaknya dan sifat kemandirian terhadap pekerjaan tinggi sekali. Silas mengemukakan hampir semua keluarga (kecuali janda dan jompo) punya pekerjaan yang mampu memberi penghasilan yang relatif tetap. Sehingga Jellinek (1995) mengemukakan apabila mereka diberi kesempatan maka mereka akan maju. Disini dapat diartikan bahwa perumahan yang teratur dengan status yang jelas akan menjadi modal dasar mereka memperbaiki kondisi sosial-ekonominya.

Dalam tulisan lainnya yang berjudul "KIP dalam Telaah Bank Dunia", Silas (dalam Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, 1996 : 470) mengemukakan bahwa kampung yang dibangun seadanya oleh warga sendiri serta kampung hasil reklamasi terhadap tempat yang terbengkelai mampu mempercepat perbaikan sosial-ekonomi penduduknya. Disini Silas ingin mengemukakan bahwa penataan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah dengan tipikal seperti tersebut diatas akan dapat mempercepat perbaikan sosial-ekonomi penghuninya.

Kemudian, Komarudin (1997 : 89) mengemukakan bahwa hasil penataan lingkungan kumuh yang sangat penting adalah semangat warga membangun lingkungan permukimannya yang tidak pernah padam. Masyarakat secara bertahap berusaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup mereka. Rasa memiliki dan mencintai daerahnya bagi warga eks lingkungan kumuh sangat besar, sehingga pembangunan tambahan jamban keluarga, jalan lingkungan, penataan taman lingkungan, betonisasi, musholla, gedung pertemuan warga dan pemasangan listrik penerangan umum dikerjakan dengan cara swadaya.

Dalam sudut pandang yang lain, Bratt (1989 : 6-7) dalam analisisnya terhadap kondisi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Amerika, mengemukakan bahwa ada empat faktor utama yang menjadi masalah dalam penyediaan perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu : keterjangkauan, tingkat kelayakan hunian, kondisi lingkungan permukiman, dan perhatian. Menurut Bratt keempat faktor tersebut saling berkaitan. Masalah keterjangkauan, Bratt mengemukakan bahwa rasio pengeluaran untuk perumahan idealnya adalah 25 % dari pendapatan, namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah rasio tersebut *output*-nya menjadi kecil sehingga hanya mampu menempati lingkungan permukiman yang kumuh dan rawan sosial. Oleh karena itu, tanpa adanya perhatian dari pemerintah maka kondisi lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan berubah, akan tetap kumuh dan rawan sosial.

Pada akhirnya Bratt (1989 : 318 & 320) menekankan bahwa keikutsertaan pemerintah dalam membantu dan memberi subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat diperlukan.

Meskipun Bratt secara tidak langsung mengemukakan hubungan antara perubahan fisik rumah dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi, namun dari penjelasan Bratt tersebut dapat diungkap bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara tingkat pendapatan dengan kondisi fisik perumahan dan kondisi sosial.

2.5. Kesimpulan Kajian Teori

1. Berdasarkan kajian teori di depan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengkaji perubahan sosial pada pembangunan perumahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
 - a). Perubahan status sosial;
 - b). Penyediaan fasilitas sosial;
 - c). Kondisi kehidupan sosial, seperti : kekerabatan, keagamaan, dan lain-lain.

2. Berdasarkan kajian teori di depan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengkaji perubahan ekonomi pada pembangunan perumahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
 - a). Perubahan pekerjaan;
 - b). Perubahan pendapatan;
 - c). Upaya penghuni meningkatkan mutu rumahnya.
3. Berdasarkan kajian teori di depan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengkaji perubahan fisik perumahan sesuai kriteria rumah sederhana yang layak dan sehat, pada pembangunan perumahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

A. Kondisi Fisik Rumah.

- a. Lantai : plesteran semen pasir; permukaan harus rata dan lebih tinggi 20 cm dari halaman;
- b. Dinding : tinggi dinding tembok minimal 90 cm dari lantai, untuk dinding kamar mandi dan WC minimal setinggi 150 cm dari lantai;
- c. Langit-langit : tidak perlu dipasang penutup;
- d. Kerangka atap : kuda-kuda dan gorden dari kayu; kaso dan reng boleh dari bambu;
- e. Penutup atap : asbes semen gelombang, seng gelombang, atau genteng sederhana.

B. Kondisi Kesehatan Rumah.

- a. Kondisi lantai : tidak lembab, tidak berdebu, tidak terjadi rembesan;

- b. Luas lantai : 12 m² per orang;
 - c. Memiliki Kamar mandi, WC dan tempat cuci sendiri;
 - d. Terdapat penerangan dan ventilasi udara;
 - e. Tersedia tempat sampah keluarga;
 - f. Terdapat aliran listrik;
 - g. Air bersih minimal dari sumur.
4. Berdasarkan kajian teori di depan, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mengkaji penyebab terjadinya perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi adalah sebagai berikut :
- a). Faktor usia;
 - b). Faktor status perkawinan;
 - c). Tingkat pendidikan;
 - d). Pekerjaan;
 - e). Tingkat pendapatan.

2.6. Variabel dan Indikator Penelitian

Berdasarkan hasil kajian teori di depan maka variabel *independent* penelitian ini adalah faktor usia, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan responden. Variabel *independent* inilah yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan fisik perumahan, sosial dan ekonomi responden. Adapun variabel *dependent* adalah perubahan fisik perumahan, sosial dan ekonomi itu sendiri, yang sangat dipengaruhi oleh upaya responden.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas maka perlu diadakan identifikasi terhadap perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi responden. Selanjutnya perlu pula

diadakan pengukuran untuk mengetahui tingkat perubahan dan tingkat keberhasilan responden secara keseluruhan.

Pada akhirnya, indikator dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perubahan fisik rumah meliputi : lantai, tinggi dinding tembok, tinggi dinding kamar mandi, dan konstruksi atap;
2. Perubahan sosial, berkaitan dengan perubahan status sosial yaitu perubahan tipe rumah;
3. Perubahan ekonomi, berkaitan dengan perubahan tingkat pendapatan responden.

BAB III

DESKRIPSI KAWASAN PENATAAN DI KELURAHAN SANGKRAH

3.1. Gambaran Umum Kelurahan Sangkrah.

3.1.1. Letak Geografis

Wilayah Kelurahan Sangkrah merupakan dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata antara 0^0 sampai dengan 1^0 . Kelurahan Sangkrah terletak antara 110^0 BT – 111^0 BT dan $7,6^0$ LS – 8^0 LS, yang terletak pada ketinggian 89 meter diatas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26^0 C.

Menurut letak geografis, Kelurahan Sangkrah terletak di daerah pinggiran bagian timur Kota Surakarta di tepian Sungai Bengawan Solo. Kondisi geologi kawasan ini merupakan tanah berlumpur atau jenis tanah liat yang bercampur dengan pasir.

Jarak Kelurahan Sangkrah ke Kecamatan Pasar Kliwon = 0,50 Km, sedangkan jarak ke Kantor Pemerintah Kota Surakarta = 0,75 Km, dan jarak ke Ibukota Propinsi di Semarang = 99 Km. Kelurahan Sangkrah adalah merupakan daerah jasa yang berupa home industri dan perdagangan.

3.1.2. Batas Administrasi

Kelurahan Sangkrah merupakan salah satu dari sembilan kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Kelurahan Sangkrah mempunyai luas wilayah sebesar 45,200 Ha, yang dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan kedunglumbu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan alam yaitu Sungai Bengawan Solo, sekaligus berseberangan dengan wilayah Pemda Tk II Sukoharjo;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Semanggi; dan
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jebres yang dipisahkan oleh Sungai Pepe.

Wilayah administrasi Kelurahan Sangkrah terdiri dari 4 wilayah lingkungan, 12 RW dan terdiri dari 50 RT.

3.1.3. Kependudukan

Di Kelurahan Sangkrah berdasarkan data kependudukan bulan April 1996 mempunyai penduduk sebanyak = 10.663 jiwa, dengan perincian 5.287 jiwa laki-laki dan 5.376 jiwa perempuan. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) = 2.524 KK, dengan perincian KK laki-laki = 1.684 KK dan KK perempuan = 840 KK.

Kepadatan penduduk di Kelurahan sangkrah adalah 236 jiwa per hektar, dengan laju pertambahan penduduk sebesar 1,45% per tahun. Perincian jumlah penduduk menurut Agama adalah sebagai berikut :

a).	Islam	=	7.351	orang
b).	Kristen Protestan	=	1.667	orang
c).	Kristen Khatolik	=	1.591	orang
d).	Budha	=	45	orang
e).	Hindu	=	9	orang.

Adapun data mata pencaharian penduduk di Kelurahan Sangkrah adalah sebagai berikut:

a).	Pengusaha	=	1.455	orang
b).	Buruh industri	=	1.120	orang
c).	Buruh bangunan	=	1.660	orang
d).	Pedagang	=	1.040	orang
e).	Pengangkutan	=	1.642	orang

f).	PNS/TNI/POLRI	=	600	orang
g).	Pensiunan	=	274	orang
h).	Lain-lain	=	1.672	orang

Data penduduk menurut pendidikan (umur 5 tahun keatas) :

a).	Tamat Perguruan Tinggi	=	45	orang
b).	Tamat SMA	=	1.685	orang
c).	Tamat SLTP	=	1.676	orang
d).	Tamat SD	=	2.890	orang
e).	Belum Tamat SD	=	1.705	orang
f).	Tidak Sekolah	=	267	orang

3.1.4. Kondisi Fisik

Di Kelurahan Sangkrah untuk melayani pergerakan manusia terdapat jalan kelas III sepanjang = 1,5 Km, jalan kelas IV = 2,5 Km, jalan desa aspal = 7 Km, dan jalan beton = 4 Km. Adapun jumlah rumah sehat = 1.153 rumah dan jumlah rumah yang kurang sehat = 130 rumah, sehingga prosentase rumah sehat = 77 %, dan kepadatan penghuni rumah = 7 orang/rumah.

3.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini meliputi tiga rukun tetangga (RT) yaitu RT.01 RW.XI Lingkungan IV, RT.06 & RT. 07 RW.X Lingkungan IV. Adapun luas areal lahan adalah 0,35 hektar yang dihuni oleh 110 kk atau 495 jiwa.

Kemudian kaitannya dengan penataan permukiman liar yang kumuh, pada awalnya areal lahan kawasan penataan tersebut merupakan lahan milik swapraja yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah kota. Dimulai pada tahun 1966, para

pendatang dari desa-desa sekitar Kota Surakarta berdatangan di lokasi tersebut dan mendirikan rumah di lokasi tersebut. Sejalan dengan bergulirnya waktu, pada akhirnya kawasan tersebut berkembang menjadi permukiman kumuh.

Pada era kepemimpinan Walikota Hartomo sekitar tahun 1988/1989 berkeinginan untuk membenahi permukiman kumuh dan permukiman liar di lahan bekas milik swapraja tersebut. Ada dua tujuan sekaligus yang ingin dicapai Walikota Surakarta, yaitu menata lingkungan permukiman di kota agar teratur dan indah serta mencoba mengangkat harkat masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat hidup dalam lingkungan yang layak.

Kegiatan pembenahan permukiman kumuh diawali melalui pertemuan rutin setiap malam Jum'at antara walikota dengan masyarakat dalam rangka mengetahui permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pembangunan perumahan. Pada akhirnya, setelah diketahui bahwa Pemkot akan menata lingkungan dan pembagian kapling dengan status hak milik, maka semangat dan motivasi masyarakat untuk membangun rumahnya menjadi sangat tinggi.

Dalam kegiatan ini ada dua pelaku yang terlibat, yaitu Pemerintah Kota Surakarta dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pembentukan organisasi untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pengadaan kapling dan prasarananya tingkat peran serta Pemkot sangat tinggi. Sedangkan tingkat peran serta kelompok masyarakat dalam perencanaan bangunan dan pelaksanaan pembangunan fisik rumah sangat tinggi, karena semua tanggung jawab ada di tangan mereka.

Pemerintah Kota membantu pengurusan izin-izin bangunan dan memperbolehkan masyarakat membangun rumahnya sesuai dengan kemampuan ekonominya, yang pada umumnya di bawah standar bangunan yang biasa berlaku. Meskipun Pemkot tidak memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam pembangunan rumahnya,

pengertian Pemkot tentang kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumahnya sudah merupakan bantuan yang cukup besar. Dengan adanya pemihakan tersebut, dapat menerima hasil pembangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah seperti apa adanya.

Tanpa disadari oleh pemerintah Kota Surakarta, dengan memberi bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kapling tersebut, telah memberi pemecahan yang konkret terhadap masalah perumahan yang dihadapi oleh mereka, sehingga menimbulkan motivasi tinggi pada masyarakat setempat untuk membangun perumahan mereka sendiri. Disamping itu, pada akhirnya investasi pemerintah Kota Surakarta pun sebagian besar dapat ditarik kembali. Sehingga dengan investasi yang relatif kecil pemerintah kota dapat mencapai beberapa tujuan yang diinginkan.

Adapun secara garis besar proses pembangunan perumahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan izin pemerintah kota tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat setempat mengajukan permasalahan yang mereka hadapi kepada Walikotamadya secara informal pada saat sarasehan malam Jum'at di kelurahan;
- b. Anggota masyarakat dengan RT, RW dan Lurah mengadakan musyawarah untuk menyusun permohonan tertulis kepada Walikota untuk memecahkan masalah lahan yang mereka hadapi;
- c. Pemberian persetujuan prinsip dari Walikota yang dilanjutkan dengan pembentukan tim Pemkot untuk menangani penataan di suatu lokasi tertentu, setelah Walikotamadya mendapat persetujuan dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri;

- d. Pengumpulan data tentang luas dan lokasi lahan yang telah digarap atau dimohon, jumlah keluarga, dan lain sebagainya oleh Pemkot;
- e. Pemeriksaan dan pengukuran lapangan untuk disesuaikan dengan data-data yang dimasukkan oleh masyarakat melalui RT, RW dan Lurah dan menampung usulan anggota masyarakat;
- f. Pembuatan rencana tapak oleh Pemkot dan selanjutnya dimusyawarahkan dengan anggota masyarakat setempat yang terlibat, untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- g. Pelaksanaan pematokan kapling, pembuatan jalan-jalan lingkungan dan selanjutnya pengurusan sertifikat tanah yang dilaksanakan oleh Pemkot;
- h. Setelah penghuni melunasi biaya-biaya yang harus dibayar, mereka akan menerima sertifikat hak milik atas lahan yang ditempati.

Program ini bergulir antara tahun 1988/1989 pada waktu pemerintahan Walikota Hartomo. Hasil konsolidasi lahan adalah berupa kapling-kapling yang luasnya berkisar antara 18 m^2 - 45 m^2 , dan dijual dengan harga antara Rp.5.000,00 – Rp.10.000,00 per m^2 . Untuk mendapatkan sertifikat tanah dengan status hak milik, warga dikenakan biaya Rp.55.000,00.

3.3. Kondisi Saat Ini di Lokasi Penelitian.

Dominasi umat Islam sangat mewarnai kehidupan sosial di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah. Fenomena di atas memberi gambaran bahwa penghuni di kawasan tersebut apabila dilihat dari sisi agama relatif homogen. Hal tersebut tentunya sedikit banyak memberi pengaruh terhadap pola organisasi kemasyarakatan di kawasan itu. Sebagaimana dapat dilihat di kawasan penataan bahwa mesjid merupakan satu-satunya

fasilitas ibadah di lingkungan tersebut, dan fasilitas pendidikan dasar yang ada di kawasan penataan itu pun sangat kental dengan nuansa Islam (lihat Gambar 3.1 dan 3.2 di bawah ini). Bahkan berdasarkan informasi dari Pak Heru, Ketua RT.07 RW.X, bahwa saat ini sedang dalam proses pembentukan SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi Terbuka, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan tersebut yang di sponsori oleh sebuah organisasi Islam.

Keadaan di atas, tentunya memberi kontribusi positif dan membantu menumbuhkan harkat serta martabat penghuni di kawasan penataan, sehingga pada akhirnya lebih percaya diri dan tidak canggung lagi bergaul dengan masyarakat sekitar. Kondisi demikian, terlihat dari penerimaan mereka yang ramah dan terbuka terhadap pendatang yang baru mereka kenal. Tidak ada kesan kecurigaan yang berlebihan dari warga terhadap pendatang baru. Sebagaimana biasanya melekat pada tipikal masyarakat permukiman liar dan kumuh di wilayah perkotaan. Serta sikap apatis warga terhadap lingkungan sekitar juga tidak nampak.

Jadi penataan perumahan di kawasan tersebut telah membuka peluang organisasi kemasyarakatan untuk ikut masuk membina penghuni. Karena status kawasan perumahan yang resmi maka tidak ada alasan lagi untuk melarang kegiatan apapun yang bersifat positif di kawasan tersebut. Sehingga salah satu contohnya adalah hadirnya organisasi keagamaan dalam melakukan pembinaan umat, baik dalam aspek keagamaan maupun pendidikan ilmu pengetahuan.



Gambar 3.1 : Mesjid yang ada di lingkungan kawasan penataan.



Gambar 3.2 : Sekolah Dasar Islam yang ada di lingkungan kawasan penataan.

Kemudian apabila mengamati data status perkawinan responden di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah, juga memperlihatkan hal yang positif. Dimana mayoritas responden (lihat Tabel III.1. di bawah) masih tetap teguh dengan status perkawinan mereka. Sehingga fenomena ini mendeskripsikan bahwa tingkat perceraian rendah. Temuan penelitian ini cukup kontras dengan pengamatan Lea Jellinek (1995) di kampung Kebon Kacang Jakarta, yang menunjukkan tingkat perceraian di komunitas kampung cukup tinggi.

TABEL III.1
STATUS PERKAWINAN RESPONDEN

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)	Keterangan
Belum kawin	-	-	Tidak ada
Kawin	47	89	Mayoritas
Janda	5	9	Minoritas
Dua	1	2	Minoritas

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Kemudian apabila mengamati komposisi usia responden di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah, maka nampak fenomena usia harapan hidup penghuni yang cukup

baik (lihat Tabel III.2 di bawah.). Dimana yang mencapai usia antara 47 – 80 tahun = 47%. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa tingkat kesehatan mereka relatif baik. Argumentasi mengenai hal tersebut didukung oleh kesaksian Pak Heru, Ketua RT.07 RW.X, yang mengatakan bahwa sebelum kawasan ini ditata, maka tingkat kesehatan warga sangat rendah, hampir tiap hari ada warga yang sakit. Sedangkan saat ini kondisinya sudah sangat jauh berbeda, warga lebih sehat dan jarang sakit.

TABEL III.2
KOMPOSISI USIA RESPONDEN

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)	Keterangan
Usia 31 – 46 tahun	28	53	Keluarga muda
Usia 47 – 62 tahun	18	34	Keluarga dewasa
Usia 63 – 80 tahun	7	13	Keluarga tua

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Jadi penataan perumahan di kawasan tersebut telah memberikan perbaikan yang berarti terhadap tingkat kesehatan penghuni, sehingga memberi harapan hidup yang lebih baik.

Masih berkaitan dengan tingkat kesehatan penghuni yang relatif baik, maka akan ditinjau pula suasana lingkungan perumahan mereka yang bersih, tidak ada bau busuk yang menyengat, serta cukup hijau (lihat gambar 3.3 dan 3.4 di bawah ini).



Gambar 3.3 : Suasana lingkungan perumahan di kawasan penataan.



Gambar 3.4 : Suasana lingkungan perumahan di kawasan penataan.

Kemudian, masih berkaitan dengan tingkat kesehatan penghuni yang relatif baik, analisis penelitian ini juga mengaitkan dengan kondisi fasilitas MCK Umum yang ada di kawasan penataan, yang terlihat bersih dan terawat baik. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3.5 dan 3.6 di bawah ini.



Gambar 3.5 : Fasilitas MCK Umum di kawasan penataan



Gambar 3.6 : Fasilitas MCK Umum di kawasan penataan

TABEL III.3.
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

KATEGORI	Suami		Istri	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Tidak sekolah	13	25	14	26
Tamat SD	21	40	24	45
Tamat SMP	9	17	9	17
Tamat SMA	9	17	6	11
Tamat Perguruan Tinggi	1	2	-	-

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Kajian terhadap Tabel III.3 di atas adalah bahwa, ada sedikit perbedaan kualitas pendidikan antara suami dan istri, dimana pendidikan suami sedikit lebih baik. Namun berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa, kualitas sumber daya manusia di kawasan penataan tersebut secara umum masih rendah. Sehingga program pemberian kursus-kursus ketrampilan terhadap mereka merupakan aspek pembinaan yang relevan dan sangat diperlukan, sebagai alternatif lain dalam rangka membuka peluang mereka memperbaiki kondisi sosial-ekonominya.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan penataan tersebut berdampak kepada rendahnya peluang mereka bersaing di bursa tenaga kerja sektor formal, sehingga pada akhirnya terbukti mayoritas dari mereka hanya bisa terserap sebagai buruh kasar dan sisanya bergerak di sektor informal. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel IV.24 di bawah ini, bahwa buruh dan wiraswasta mendominasi jenis pekerjaan responden di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah.

TABEL III.4.
JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

KATEGORI	Suami		Istri	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
PNS/TNI/POLRI	2	4	-	-
Pensiunan	-	-	-	-
Wiraswasta	14	27	10	19
Buruh	35	67	28	53
Pemulung	1	2	-	-
Pengangguran	-		15	28

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Implikasi dari jenis pekerjaan responden di atas adalah terlihat pada tingkat pendapatan mereka yang masih sangat rendah, yaitu mayoritas masih dibawah Rp.250.000,- per bulan (lihat Tabel III.5 di bawah ini).

TABEL III.5.
TINGKAT PENDAPATAN KELUARGA

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Dibawah Rp.250 ribu	40	77
Rp.250 ribu – 500 ribu	9	17
Rp.500 ribu – 750 ribu	2	4
Diatas Rp.750 ribu	1	2

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Namun dalam suasana kondisi ekonomi mereka yang masih lemah, ada satu hal yang menggembirakan yang merupakan temuan menarik dalam penelitian ini, yaitu

fenomena kualitas pendidikan anak-anak mereka yang relatif baik (lihat Tabel III.6 di bawah ini).

Berdasarkan fenomena diatas maka kesimpulan adalah bahwa, meskipun tingkat pendapatan mereka masih sangat rendah namun memiliki tekad yang kuat dari para orang tua untuk memberi kehidupan yang lebih baik terhadap generasi penerus mereka. Hal ini merupakan sisi positif dari hasil penataan perumahan mereka, dan merupakan bukti kuat bahwa mereka berupaya keras membangun harkat dan martabat kehidupannya.

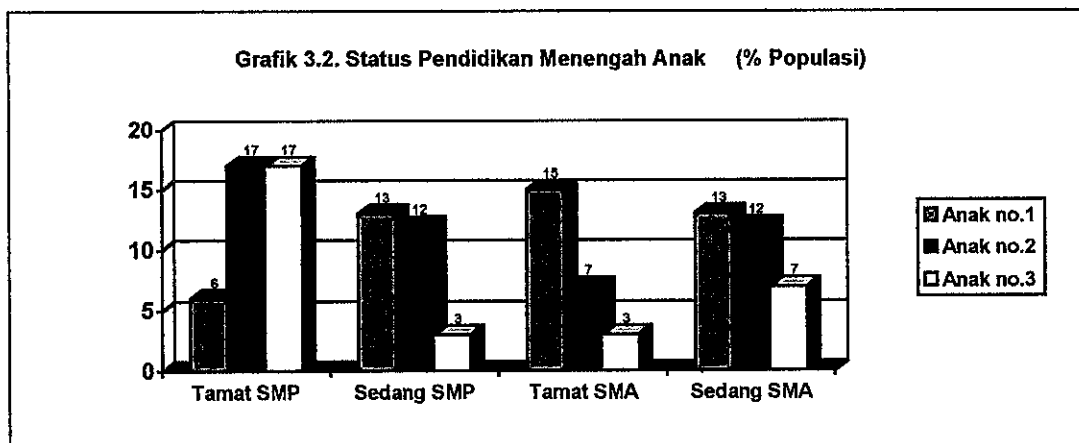
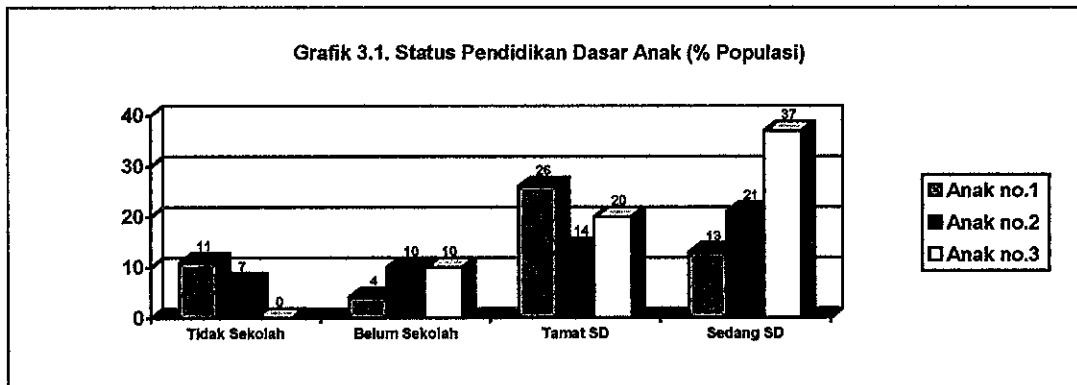
TABEL III.6.
TINGKAT PENDIDIKAN ANAK

KATEGORI	Anak no.1		Anak no.2		Anak no.3	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak sekolah	5	11	3	7	-	-
Belum sekolah	2	4	4	10	3	10
Tamat SD	12	26	6	14	6	20
Sedang SD	6	13	9	21	11	37
Tamat SMP	3	6	7	17	5	17
Sedang SMP	6	13	5	12	1	3
Tamat SMA	10	21	4	10	1	3
Sedang SMA	3	6	4	10	2	7
Tamat PT	-	-	-	-	-	-
Sedang di PT	-	-	-	-	1	3

Sumber : Analisa hasil penelitian, 2002.

Kajian terhadap Tabel III.6 di atas menunjukkan bahwa grafik pendidikan anak di kawasan penataan semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada data anak yang tidak sekolah. Pada anak pertama ada sebesar 11% dari populasi yang sudah memenuhi syarat sekolah SD tetapi tidak sekolah, namun pada anak ke dua grafiknya menurun yaitu hanya sebesar 7% dari populasi yang sudah memenuhi syarat sekolah SD tetapi tidak sekolah,

bahkan pada anak ke tiga tidak ada lagi anak usia sekolah SD yang tidak sekolah (lihat Grafik 3.1 dan 3.2 di bawah ini).



Jadi apabila mengamati grafik 3.1 di atas, khususnya pada kategori tidak sekolah, maka analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah semakin kesini kesadaran dan tekad orang tua untuk menyekolahkan anak mereka semakin tinggi, meskipun mereka rata-rata berpenghasilan sangat rendah dibawah Rp.250.000,- per bulan. Begitu juga apabila dilihat dari status data tingkat sekolah dasar, menunjukkan kesadaran dan tekad orang tua yang semakin membaik dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Pada anak pertama mereka yang hanya lulus SD menunjukkan angka sebesar 26 % dari populasi, sedangkan anak ke dua yang hanya lulus

SD angkanya menurun menjadi sebesar 14 % dari populasi, dan pada anak ke tiga terdapat 20 % dari populasi yang hanya lulus SD. Namun yang menarik *pada anak ke tiga* adalah sudah ada *satu orang anak yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi*.

Kemudian berkaitan dengan tingkat kelayakan hunian, fenomenanya dapat dilihat pada Tabel III. 7 di bawah ini

TABEL III. 7
TINGKAT KELAYAKAN HUNIAN

KATEGORI	Jumlah	Persentase (%)
Layak ($\geq 12 \text{ m}^2/\text{orang}$)	8	15
Cukup layak ($< 12 - 9 \text{ m}^2/\text{orang}$)	9	17
Tidak layak ($< 9 \text{ m}^2/\text{orang}$)	36	68

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Berdasarkan Tabel III. 7 di atas adalah bahwa mayoritas kondisi rumah responden tingkat huniannya masih padat, sehingga apabila ditinjau dari aspek kesehatan rumah maka hal tersebut masih belum memenuhi syarat. Kondisi tersebut diatas sangat terkait erat dengan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan responden yang mayoritas masih rendah. Sehingga berdasarkan pada fenomena tersebut di atas maka semakin memperkuat anggapan bahwa, apabila penataan permukiman liar dan kumuh hanya menyentuh aspek fisik saja tanpa dibarengi dengan pembinaan aspek ekonomi, maka penghuni kesulitan memenuhi persyaratan tingkat kelayakan hunian.

3.4. Perubahan Fisik Rumah

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan fisik rumah, maka akan dibandingkan antara kondisi fisik rumah pada tahun 1990 dengan kondisi pada tahun 2002.

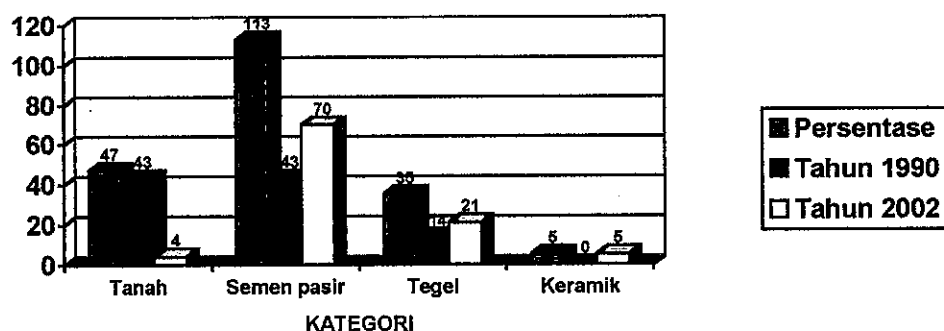
Adapun komponen fisik rumah yang akan ditinjau adalah lantai, tinggi dinding tembok, tinggi dinding kamar mandi, dan konstruksi atap.

TABEL III.8
PERUBAHAN LANTAI RUMAH

KATEGORI MUTU LANTAI	Tahun 1990		Tahun 2002		Keterangan
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
Tanah	23	43	2	4	Turun 39%
Plesteran semen pasir	23	43	37	70	Naik 27%
Tegel	7	14	11	21	Naik 7%
Keramik	-	-	3	5	Naik 5%

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Grafik 3.3. Perubahan Pada Kualitas Lantai



Kajian terhadap Tabel III.8 dan Grafik 3.3 di atas adalah bahwa secara teknis pada kondisi tahun 2002 mayoritas rumah responden di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah telah memenuhi persyaratan standar rumah sederhana yang layak, yang mensyaratkan lantai minimal dari plesteran semen pasir.

Namun apabila mengamati perkembangan kondisi pada tahun 1990 ke tahun 2002, nampak upaya penghuni yang serius untuk meningkatkan kualitas lantainya. Sehingga dari yang pada tahun 1990 masih 23 atau 43% rumah responden masih belum memenuhi persyaratan standar rumah sederhana yang layak karena lantainya masih tanah,

maka pada tahun 2002 hanya tinggal 2 atau 4% rumah responden yang lantainya masih tanah. Hal ini membuktikan bahwa kondisi permukiman yang *legal* disertai kepemilikan hak atas tanah yang sah, akan memotivasi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan penataan mengupayakan peningkatan lantai rumahnya.

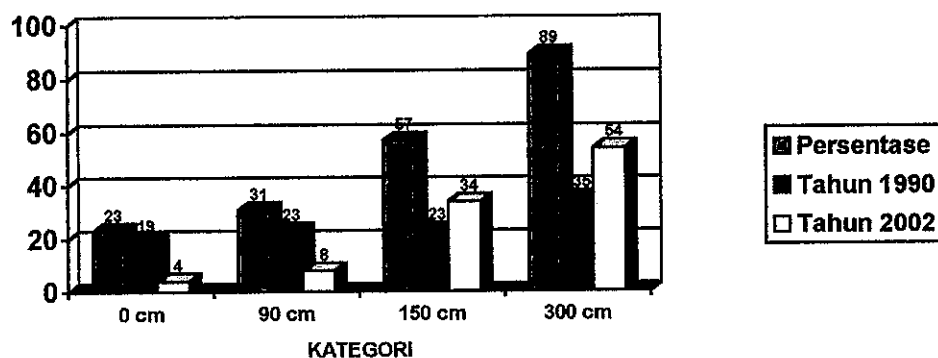
Kajian selanjutnya adalah perubahan terhadap tinggi dinding tembok, dimana persyaratan rumah sederhana yang layak adalah tinggi dari lantai = 90 cm. Untuk mengetahui keadaan perubahan tinggi dinding tembok di kawasan penataan, berikut dapat disimak pada Tabel III.9 dan Grafik 3.4 di bawah ini.

TABEL III.9
PERUBAHAN TINGGI DINDING TEMBOK

KATEGORI Tinggi Dinding Tembok	Tahun 1990		Tahun 2002		Keterangan
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
0	10	19	2	4	Turun 15%
90 cm	12	23	4	8	Turun 15%
150 cm	12	23	18	34	Naik 11%
300 cm	19	35	29	54	Naik 19%

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Grafik 3.4. Perubahan Pada Tinggi Dinding Tembok



Kajian terhadap Tabel III.9 dan Grafik 3.4 di atas adalah bahwa pada kondisi tahun 2002 hanya tinggal 2 atau 4% rumah responden yang tidak memenuhi syarat standar rumah sederhana yang layak, yang mensyaratkan tinggi dinding tembok minimal 90 cm dari lantai.

Namun apabila mengamati fenomena di atas, bahwa pada tahun 1990 saja sudah 43 atau 81% rumah responden mampu memenuhi persyaratan standar tinggi dinding tembok untuk rumah sederhana, hal ini membuktikan bahwa motivasi penghuni sangat tinggi untuk meningkatkan kualitas rumahnya, karena yakin tidak akan digusur. Dan hal ini juga membuktikan bahwa upaya mereka meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang berakal dan berbudi sangat kuat. Jadi begitu mereka diberi kesempatan maka akan mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

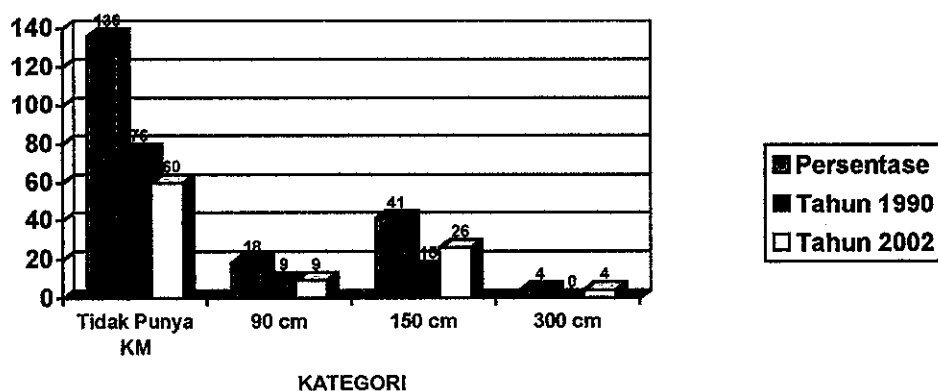
Standar rumah sederhana yang layak lainnya adalah persyaratan tinggi dinding tembok kamar mandi = 150 cm dari lantai. Keadaan perubahan tinggi dinding tembok kamar mandi di kawasan penataan dapat disimak pada Tabel III.10 dan Grafik 3.5. di bawah ini.

TABEL III.10
PERUBAHAN TINGGI DINDING KAMAR MANDI

KATEGORI Tinggi Dinding Tembok	Tahun 1990		Tahun 2002		Keterangan
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
0	-	-	-	-	
90 cm	5	9	5	9	Tetap
150 cm	8	15	14	26	Naik 11%
300 cm	-	-	2	4	Naik 4%
Tidak punya KM sendiri	40	76	32	60	Turun 16%

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Grafik 3.5. Perubahan Pada Tinggi Dinding Kamar Mandi



Kajian terhadap Tabel III.10 dan Grafik 3.5. di atas adalah bahwa pada tahun 2002 baru 16 atau 30% rumah responden yang tinggi dinding kamar mandinya memenuhi persyaratan standar rumah sederhana yang layak, yaitu persyaratannya adalah 150 cm dari lantai. Bagi yang tidak mempunyai kamar mandi sendiri menggunakan fasilitas MCK umum.

Meskipun begitu kondisi di atas menunjukkan sedikit kemajuan, dimana apabila mengamati kondisi pada tahun 1990 maka hanya 8 atau 15% rumah responden yang mampu memenuhi persyaratan tinggi dinding kamar mandi, sedangkan pada tahun 2002 telah mencapai 16 atau 30%. Jadi terdapat kenaikan sebesar 8 atau 15% rumah responden yang memenuhi persyaratan tinggi dinding kamar mandi.

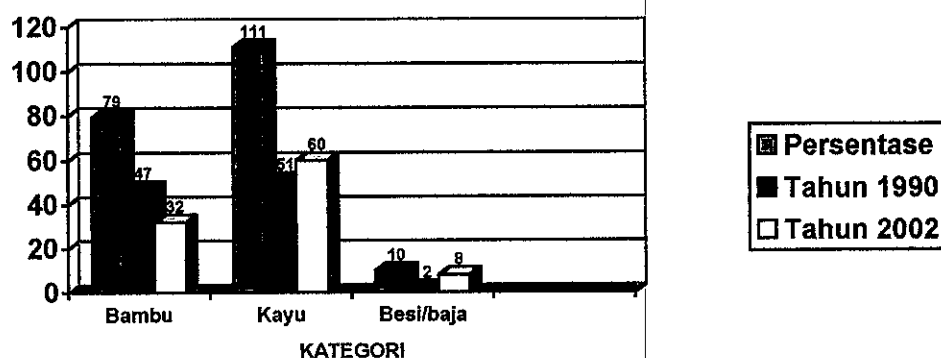
Kajian selanjutnya adalah perubahan rangka kuda-kuda dan gording, dimana persyaratan dalam standar rumah sederhana yang layak adalah kayu. Upaya penghuni di kawasan penataan dalam memenuhi persyaratan tersebut dapat disimak dalam Tabel III.11 dan Grafik 3.6 di bawah ini.

TABEL III.11
PERUBAHAN KUDA-KUDA & GORDING

KATEGORI Kuda-kuda & Gording	Tahun 1990		Tahun 2002		Keterangan
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
Bambu	25	47	17	32	Turun 15%
Kayu	27	51	32	60	Naik 9%
Besi/baja	1	2	4	8	Naik 6%

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Grafik 3.6. Perubahan Pada Bahan Rangka Kuda-kuda & Gording



Kajian terhadap Tabel III.11 dan Grafik 3.6. di atas adalah bahwa pada tahun 1990 ada 28 atau 55% rumah responden yang telah memenuhi persyaratan kuda-kuda dan gording dari kayu, dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 36 atau 71%. Jadi kalau melihat kondisi eksisting pada tahun 2002, maka mayoritas responden berhasil memenuhi persyaratan standar kuda-kuda dan gording dari kayu.

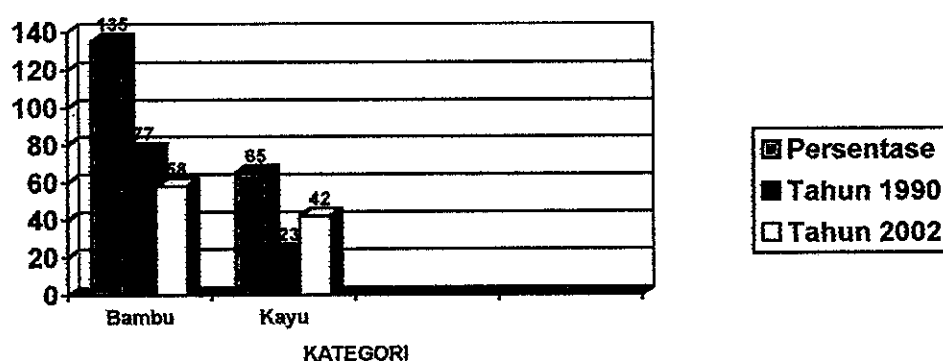
Kajian selanjutnya adalah perubahan kaso dan reng, dimana persyaratan dalam standar rumah sederhana yang layak boleh dari bambu. Upaya penghuni di kawasan penataan dalam memenuhi persyaratan tersebut dapat disimak dalam Tabel III.12 dan Grafik 3.7. di bawah ini.

TABEL III.12
PERUBAHAN KASO & RENG

KATEGORI Kaso & Reng	Tahun 1990		Tahun 2002		Keterangan
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
Bambu	41	77	31	58	Turun 19%
Kayu	12	23	22	42	Naik 19%

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Grafik 3.7. Perubahan Pada Bahan Kaso & Reng



Interpretasi terhadap Tabel III.12 dan Grafik 3.7 di atas adalah bahwa pada tahun 1990 ada 41 atau 77% rumah responden yang masih menggunakan bambu sebagai bahan kaso dan reng, meskipun hal tersebut telah memenuhi persyaratan standar rumah sederhana yang layak, namun pada tahun 2002 yang menggunakan bambu menurun menjadi 31 atau 58%. Adapun penggunaan bahan dari kayu meningkat menjadi 22 atau 42%. Jadi untuk persyaratan teknis bahan kaso dan reng dari bambu sudah sejak awal penghuni mampu memenuhi persyaratan teknis, namun penghuni terus berupaya meningkatkan dengan bahan kayu. Jadi dari fenomena di atas nampak penghuni terus berupaya meningkatkan kualitas rumahnya.

Analisis selanjutnya adalah perubahan penutup atap, dimana persyaratan dalam standar rumah sederhana yang layak adalah asbes gelombang, seng gelombang atau

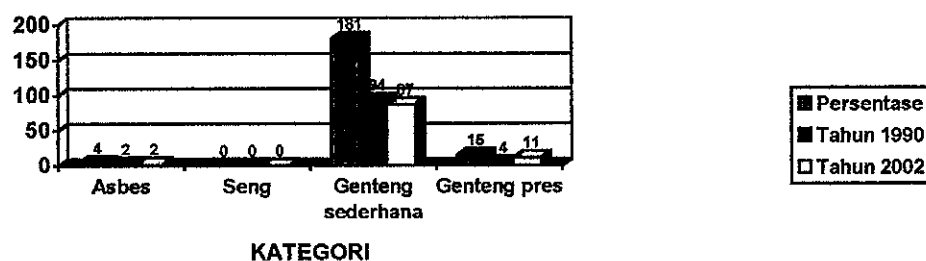
genteng sederhana. Upaya penghuni di kawasan penataan dalam memenuhi persyaratan tersebut dapat disimak dalam Tabel III.13 dan Grafik 3.8 di bawah ini.

TABEL III.13
PERUBAHAN PENUTUP ATAP

KATEGORI Penutup Atap	Tahun 1990		Tahun 2002		Keterangan
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
Asbes gelombang	1	2	1	2	Tetap
Seng gelombang	-	-	-	-	Tetap
Genteng sederhana	50	94	46	87	Turun 7%
Genteng pres/beton	2	4	6	11	Naik 7%

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Grafik 3.8. Perubahan Pada Penutup Atap



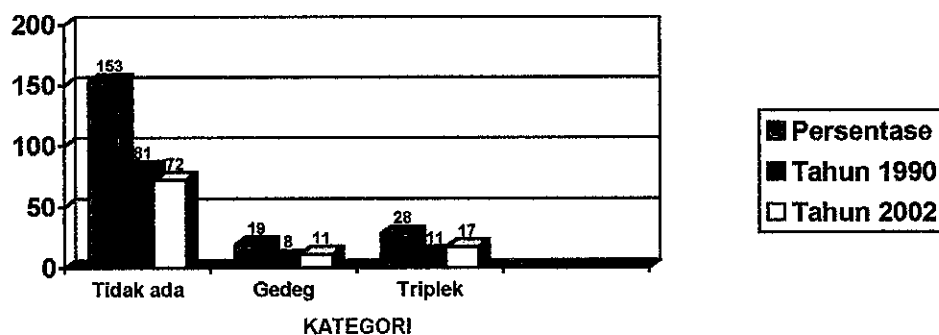
Kajian selanjutnya adalah mengamati perubahan penutup langit-langit. Meskipun dalam standar rumah sederhana yang layak tidak diharuskan menggunakan penutup langit-langit, namun fenomena ini dapat mendeskripsikan upaya penghuni di kawasan penataan meningkatkan mutu rumahnya. Uraian mengenai perubahan penutup langit-langit dapat disimak pada Tabel III.14 dan Grafik 3.9 di bawah ini.

TABEL III.14
PERUBAHAN PENUTUP LANGIT-LANGIT

KATEGORI Penutup Langit-langit	Tahun 1990		Tahun 2002		Keterangan
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
Tidak ada	42	81	38	72	Turun 9%
Gedeg (anyaman bambu)	4	8	6	11	Naik 3%
Triplek	6	11	9	17	Naik 6%

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Grafik 3.9. Perubahan Pada Bahan Penutup Langit-langit



Kajian terhadap Tabel III.14 dan Grafik 3.9 di atas adalah bahwa ada upaya dari penghuni untuk terus meningkatkan kualitas rumahnya. Pada tahun 1990 terdapat sebesar 10 atau 19% rumah responden yang menggunakan penutup langit-langit rumahnya dan pada tahun 2002 berubah meningkat menjadi 15 atau 28%. Jadi dari fenomena di atas nampak bahwa pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah berpengaruh terhadap upaya penghuni meningkatkan mutu rumahnya.

Untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang perubahan fisik perumahan, maka seluruh komponen tersebut diatas akan dirangkum dalam satu tabel. Namun perlu diketahui bahwa perubahan fisik rumah tersebut tolok ukurnya adalah standar rumah

sederhana yang layak. Jadi inti dari analisis ini adalah bahwa perubahan fisik rumah tersebut harus memenuhi/sesuai standar minimal rumah sederhana yang layak.

TABEL III.15
RANGKUMAN PERUBAHAN FISIK RUMAH

Komponen Fisik Rumah	Kondisi Tahun 1990		Kondisi Tahun 2002		Keterangan (sesuai standar)
	Tidak sesuai standar	Sesuai standar	Tidak sesuai standar	Sesuai standar	
Lantai	23 (43%)	30 (57%)	2 (4%)	51 (96%)	Naik 21 (40%)
Tinggi dinding tembok	10 (19%)	43 (81%)	2 (4%)	51 (96%)	Naik 8 (15%)
Tinggi dinding KM	45 (85%)	8 (15%)	37 (70%)	16 (30%)	Naik 8 (15%)
Kuda-kuda & gording	25 (47%)	28 (53%)	17 (32%)	36 (68%)	Naik 8 (15%)
Kaso & reng	0	53 (100%)	0	53 (100%)	Tetap
Penutup atap	0	53 (100%)	0	53 (100%)	Tetap
Penutup langit-langit	0	53 (100%)	0	53 (100%)	Tetap
Nilai rata-rata		38 (72%)		45 (85%)	Naik 7 (13%)

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Kajian terhadap fenomena dalam Tabel III.15 diatas memberikan informasi bahwa responden dalam mengupayakan perubahan fisik rumahnya mendahulukan dinding tembok sampai dengan konstruksi atap, sedangkan untuk lantai diupayakan belakangan. Hal tersebut terlihat dari perubahan yang paling menonjol adalah pada komponen lantai. Dan dari fenomena diatas, sisi lemah dari perubahan fisik rumah responden adalah pada komponen tinggi dinding kamar mandi. Dimana ada 37 atau 70% responden yang tidak mempunyai kamar mandi sendiri dan tidak berusaha memenuhi standar rumah sederhana yang layak. Nampaknya responden kesulitan atau mungkin tidak menganggap penting untuk membuat kamar mandi sendiri. Disamping itu, hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah komponen kuda-kuda dan gording. Dimana dalam hal ini masih ada 17

atau 32% responden yang belum mampu membuat kuda-kuda dan gording dari kayu. Kondisi seperti ini tentunya cukup memprihatinkan mengingat komponen kuda-kuda dan gording merupakan komponen utama penyangga konstruksi atap. Lebih-lebih bahwa ternyata mayoritas responden menggunakan genteng sebagai penutup atap, sehingga apabila kuda-kuda dan gording tidak kuat dikhawatirkan akan roboh.

Gambaran visual mengenai beberapa kondisi fisik rumah penghuni di kawasan penataan pada sekitar tahun 1990-an disajikan dalam Gambar 3.7 di bawah ini.

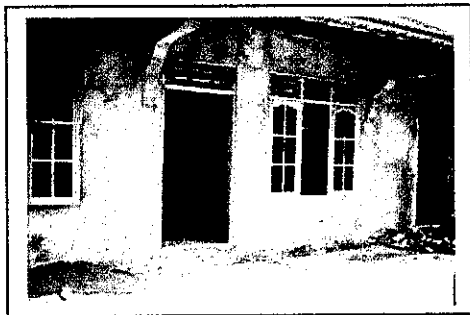


Gambar 3.7 Kondisi rumah pada tahun 1990-an
Sumber : Dokumentasi Kantor Kelurahan Sangkrah



Gambar 3.7 Kondisi rumah pada tahun 1990-an

Gambaran visual kondisi eksisting rumah penghuni di kawasan penataan, yang diambil pada awal bulan Agustus 2002 disajikan pada Gambar 3.8 di bawah ini.



Gambar 3.8. Rumah yang sedang dirombak total



Gambar 3.8. Sebagian rumah yang mampu memenuhi standar rumah sederhana

Gambaran visual di atas adalah beberapa rumah penghuni di kawasan penataan yang telah berhasil membangun permanen rumahnya. Namun potret lain di bawah ini akan menyajikan beberapa rumah penghuni yang masih semi permanen.



Gambar 3.9. Kondisi rumah semi permanen



Gambar 3.9. Variasi kondisi rumah penghuni

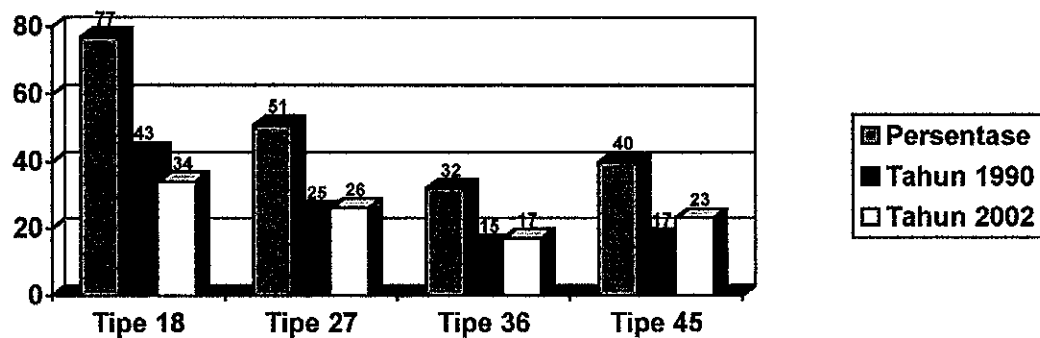
3.5. Perubahan sosial

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan sosial, maka yang akan ditinjau adalah perubahan status sosial yaitu perubahan tipe rumah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan tipe rumah maka akan dibandingkan antara tipe rumah pada tahun 1990 dengan tipe rumah pada tahun 2002.

TABEL III.16
PERUBAHAN TIPE RUMAH

KATEGORI TIPE RUMAH	Tahun 1990		Tahun 2002		Keterangan
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
Tipe 18	23	43	18	34	Turun 5 (9%)
Tipe 27	13	25	14	26	Naik 1 (1%)
Tipe 36	8	15	9	17	Naik 1 (2%)
Tipe 45	9	17	12	23	Naik 3 (6%)

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Grafik 3.10. Perubahan Tipe Rumah

Kajian terhadap Tabel III.16 dan Grafik 3.10 diatas menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan tipe rumah sebesar 5 atau 9 %, dan perubahan terbesar terjadi pada Tipe 45 sebesar 3 atau 6 %. Berdasarkan fenomena tersebut diatas, nampak bahwa penataan permukiman liar yang kumuh di Kelurahan Sangkrah tidak banyak memberi dampak terhadap perubahan sosial. Namun apabila melihat kepada prestasi responden dalam mengupayakan kualitas fisik rumahnya seperti telah diuraikan dimuka, maka sebenarnya terdapat potensi sosial yang dapat dikembangkan, khususnya yang berkaitan dengan aspek peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan ketrampilan kerja.

3.6. Perubahan Ekonomi

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan ekonomi, maka yang akan ditinjau adalah perubahan pendapatan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan pendapatan maka akan dibandingkan antara pendapatan pada tahun 1990 dengan pendapatan pada tahun 2002.

TABEL III.17
PERUBAHAN PENDAPATAN RESPONDEN

Kategori	Tahun 1990		Tahun 2002		Keterangan
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
Dibawah Rp.250 ribu	40	77	33	63	Turun 14%
Rp.250 ribu – Rp.500 ribu	9	17	16	31	Naik 14%
Rp.500 ribu – Rp.750 ribu	2	4	2	4	Tetap
Diatas Rp.750 ribu	1	2	1	2	Tetap

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002.

Kajian terhadap Tabel III.17 di atas adalah bahwa telah terjadi perubahan tingkat pendapatan sebesar 7 atau 14% responden, dari yang tadinya tingkat pendapatannya dibawah Rp.250.000,- meningkat menjadi antara Rp.250.000,- - Rp.500.000,-. Berdasarkan fenomena tersebut diatas memberi gambaran bahwa apabila program penataan permukiman kumuh dan liar hanya menyentuh aspek fisik saja sedangkan aspek ekonomi penghuni tidak dibina, maka tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap perubahan tingkat pendapatan mereka.

BAB IV

ANALISIS PERUBAHAN PADA PASCA HUNI PENATAAN PERMUKIMAN LIAR & KUMUH DI KELURAHAN SANGKRAH

4.1. Analisis Perubahan Fisik Rumah

4.1.1. Tingkat Perubahan Fisik Rumah

Tingkat perubahan fisik rumah akan ditinjau terhadap komponen lantai, dinding, dan rangka atap. Tinjauan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji perubahan mutu rumah penghuni setelah lingkungan permukiman mereka lebih teratur dan tidak liar lagi.

Kajian terhadap tingkat perubahan fisik rumah akan dimulai dari kajian dampak terhadap tingkat perubahan kualitas lantai rumah penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah, sebagaimana dapat disimak pada Tabel IV.1 di bawah ini.

TABEL IV.1
TINGKAT PERUBAHAN KUALITAS LANTAI RUMAH

Jenis Perubahan	Distribusi		Tingkat Perubahan
	Frekuensi	Persentase (%)	
Perubahan kualitas lantai ke plesteran semen-pasir	20	38	Sedang
Perubahan kualitas lantai ke tegel	5	9	Tinggi
Perubahan kualitas lantai ke keramik	3	6	Sangat tinggi

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Kajian terhadap Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa dampak penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah telah menghasilkan perubahan mutu lantai ke tingkat perubahan sedang = 38 %; tingkat perubahan tinggi = 9 %; dan tingkat perubahan sangat tinggi = 6 %.

Berdasarkan fenomena di atas nampak bahwa dampak yang paling menonjol pada komponen lantai adalah tingkat perubahan sedang, yaitu perubahan kualitas lantai ke plesteran semen-pasir.

Kajian selanjutnya, masih berkaitan dengan tingkat perubahan fisik rumah, adalah kajian dampak terhadap tingkat perubahan tinggi dinding tembok, sebagaimana dapat disimak pada Tabel. IV.2 di bawah ini.

TABEL IV.2
TINGKAT PERUBAHAN TINGGI DINDING TEMBOK

Jenis Perubahan	Distribusi		Tingkat Perubahan
	Frekuensi	Persentase (%)	
Perubahan tinggi dinding tembok ke tinggi 150 cm	8	15	Tinggi
Perubahan tinggi dinding tembok ke tinggi 300 cm	10	19	Sangat tinggi

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Kajian terhadap Tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa dampak penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah telah menghasilkan perubahan mutu dinding ke tingkat perubahan tinggi = 15 %; dan tingkat perubahan sangat tinggi = 19 %.

Berdasarkan fenomena di atas nampak bahwa dampak yang paling menonjol pada komponen dinding adalah tingkat perubahan sangat tinggi, yaitu perubahan ke dinding tembok penuh. Dari fenomena tersebut menunjukkan gambaran bahwa upaya penghuni membuat rumah permanen cukup menonjol.

Kajian selanjutnya adalah kajian dampak terhadap tingkat perubahan kualitas rangka atap, sebagaimana dapat disimak pada Tabel IV.3. di bawah ini.

TABEL IV.3
TINGKAT PERUBAHAN KUALITAS RANGKA ATAP

Jenis Perubahan	Distribusi		Tingkat Perubahan
	Frekuensi	Persentase (%)	
Perubahan kualitas rangka atap ke kayu	8	15	Sedang
Perubahan kualitas rangka atap ke baja	3	6	Tinggi

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Kajian terhadap Tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa dampak penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah telah menghasilkan perubahan mutu rangka atap ke tingkat perubahan sedang = 15 %; dan tingkat perubahan tinggi = 6 %.

Berdasarkan fenomena di atas nampak bahwa dampak yang paling menonjol pada komponen rangka atap adalah tingkat perubahan sedang, yaitu perubahan rangka atap ke kualitas kayu.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat perubahan fisik rumah yang paling menonjol di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah adalah pada komponen kualitas lantai rumah, yaitu tingkat perubahan sedang (38%). Apabila kesimpulan tersebut dikaitkan dengan Tabel III.5 di depan mengenai fenomena tingkat pendapatan penghuni, dimana 77% penghuni berpenghasilan dibawah Rp.250.000,- per bulan, maka fenomena perubahan fisik rumah tersebut nampaknya dilatarbelakangi oleh kemampuan ekonomi penghuni yang mayoritas masih lemah. Kemudian, apabila kesimpulan tersebut dikaitkan dengan Tabel III.3 di depan perihal tingkat pendidikan penghuni, dimana 65% penghuni hanya tamat SD dan tidak sekolah, maka fenomena tingkat perubahan fisik rumah tersebut dilatarbelakangi pula oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan penataan tersebut. Lebih lanjut, apabila fenomena tingkat perubahan fisik rumah dikaitkan dengan Tabel III.4 di depan tentang jenis pekerjaan

penghuni, dimana 67% penghuni bekerja sebagai buruh, maka fenomena tingkat perubahan fisik rumah tersebut dilatarbelakangi pula oleh lemahnya keahlian penghuni di kawasan penataan tersebut.

Jadi untuk memacu tingkat perubahan fisik rumah yang lebih tinggi lagi di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah, maka hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan ketrampilan kerja penghuni perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang berwenang di Kota Surakarta.

4.1.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Fisik Rumah

Untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik rumah maka akan mengambil sampel rangka atap, dengan pertimbangan bahwa komponen tersebut sangat penting karena menyangkut keamanan dan keselamatan penghuni, namun faktanya masih 32 % penghuni (lihat Tabel III.11) masih belum mampu memenuhi sesuai standar. Pilihan tersebut asumsinya adalah bahwa, ada alasan-alasan tertentu dari penghuni sehingga tidak memprioritaskan rangka atap dalam struktur fisik rumahnya. Diharapkan tinjauan terhadap komponen tersebut mewakili kebutuhan analisis ini karena mengambil sampel yang ekstrim dan strategis.

Dari hasil perhitungan SPSS (lihat lampiran), maka faktor yang mempengaruhi perubahan fisik rumah adalah usia, pendapatan dan pekerjaan. Adapun untuk faktor pendidikan tidak mempengaruhi perubahan fisik rumah.

Untuk faktor usia, kecenderungannya adalah bahwa semakin muda kesadaran untuk memenuhi kualitas fisik rumahnya semakin baik. Dimana penghuni kelompok usia 31 – 62 tahun kemampuan memenuhi kualitas fisik rumahnya lebih baik dibanding kelompok usia 63 – 80 tahun.

Untuk faktor pendapatan, kecenderungannya normal dimana penghuni yang berpenghasilan lebih tinggi lebih mampu memenuhi kualitas fisik rumahnya. Dari faktor pendapatan nampak bahwa penghuni yang pendapatannya dibawah Rp.250.000,- per bulan prosentase perubahan rumahnya paling kecil, sedangkan penghuni yang pendapatannya diatas Rp.500.000,- per bulan prosentase perubahan rumahnya paling tinggi.

Untuk faktor pekerjaan, memperlihatkan kecenderungan normal dimana penghuni yang berpenghasilan lebih pasti dan lebih tetap prosentase perubahan rumahnya lebih baik. Dari faktor pekerjaan nampak bahwa, responden yang bekerja sebagai buruh prosentase perubahan rumahnya paling kecil, kemudian penghuni yang bekerja sebagai wiraswastawan prosentase perubahan rumahnya lebih besar dibanding buruh, sedangkan prosentase perubahan rumah yang paling besar adalah penghuni yang bekerja sebagai PNS.

4.2. Analisis Perubahan Sosial

4.2.1. Tingkat Perubahan Sosial

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat perubahan sosial penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah indikatornya adalah perubahan tipe rumah. Sebab konteks perubahan sosial dalam penelitian ini adalah dampak dari pembangunan perumahan, oleh karena itu perubahan sosial yang relevan adalah tipe rumah penghuni karena berkaitan dengan status sosial.

Kajian terhadap perubahan tipe rumah penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah, dapat disimak pada Tabel IV.4 di bawah ini.

TABEL IV.4
TINGKAT PERUBAHAN TIPE RUMAH

Jenis Perubahan	Distribusi		Tingkat Perubahan
	Frekuensi	Persentase (%)	
Perubahan rumah ke tipe 27	1	2	Sedang
Perubahan rumah ke tipe 36	1	2	Tinggi
Perubahan rumah ke tipe 45	3	6	Sangat tinggi

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Kajian terhadap Tabel IV.4 di atas menunjukkan bahwa dampak penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah telah menghasilkan perubahan tipe rumah penghuni ke tingkat perubahan sedang = 2 %; tingkat perubahan tinggi = 2 %; dan tingkat perubahan sangat tinggi = 6 %.

Berdasarkan fenomena di atas nampak bahwa dampak yang paling menonjol pada perubahan tipe rumah penghuni adalah tingkat perubahan sangat tinggi, yaitu perubahan rumah ke tipe 45. Meskipun begitu tingkat perubahan tipe rumah tersebut sangat kecil dibanding tingkat perubahan fisik rumah. Dengan demikian, sebagaimana pada kasus tingkat perubahan fisik rumah, maka semakin memperkuat kesimpulan bahwa faktor tingkat pendapatan dan ketrampilan kerja penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang berwenang di Kota Surakarta.

Jadi untuk memacu tingkat perubahan sosial yang lebih tinggi lagi di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah, maka hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan ketrampilan kerja penghuni perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang berwenang di Kota Surakarta.

4.2.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS (lihat lampiran), maka faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial adalah faktor pendapatan, pendidikan, usia, dan pekerjaan.

Untuk faktor pendapatan, kecenderungannya normal bahwa penghuni yang berpenghasilan lebih rendah prosentase kemampuan merubah tipe rumahnya lebih kecil dibanding penghuni yang berpenghasilan lebih tinggi. Dari faktor pendapatan nampak bahwa penghuni yang penghasilannya diatas Rp.500.000,- per bulan prosentase kemampuan berubah tipe rumahnya paling tinggi, sedangkan penghuni yang berpenghasilan antara Rp.250.00,- - Rp.500.000,- per bulan prosentase kemampuan merubah tipe rumahnya lebih rendah dibanding dengan di atas, sedangkan yang paling rendah kemampuan merubah tipe rumahnya adalah penghuni yang berpenghasilan dibawah Rp.250.000,- per bulan.

Untuk faktor pendidikan, ada kecenderungan penghuni yang pendidikannya SMA ke atas lebih mampu merubah tipe rumahnya, sedangkan untuk penghuni yang berpendidikan SMP dan SD ke bawah kemampuannya relatif sama.

Untuk faktor usia, yang menonjol lebih mampu merubah tipe rumahnya adalah penghuni kelompok usia antara 31 – 46 tahun, sedangkan untuk penghuni kelompok usia antara 47 – 62 tahun dan 63 - 80 tahun kemampuannya relatif sama.

Untuk faktor pekerjaan, kecenderungannya adalah bahwa penghuni yang bekerja sebagai wiraswastawan kemampuan merubah tipe rumahnya prosentasenya paling tinggi, sedangkan nomer dua adalah buruh, dan yang paling rendah kemampuan merubah tipe rumahnya adalah penghuni yang bekerja sebagai PNS.

4.3. Analisis Perubahan Ekonomi

4.3.1. Tingkat Perubahan Ekonomi

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat perubahan ekonomi penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah indikatornya adalah perubahan pendapatan.

Kajian terhadap perubahan pendapatan penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah, dapat disimak pada Tabel IV.5 di bawah ini.

TABEL IV.5
TINGKAT PERUBAHAN PENDAPATAN

Jenis Perubahan	Distribusi		Tingkat Perubahan
	Frekuensi	Persentase (%)	
Perubahan pendapatan penghuni ke level Rp.250 ribu –Rp.500 ribu	7	14	Sedang

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2002

Kajian terhadap Tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa dampak penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah telah menghasilkan perubahan pendapatan penghuni ke tingkat perubahan sedang = 14 %. Tingkat perubahan tersebut relatif sangat kecil, apalagi apabila dikaitkan dengan *time value of money* (antara tahun 1990 – tahun 2002), maka tingkat perubahan pendapatan tersebut menjadi tidak ada artinya apa-apa.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka menjadi semakin jelas bahwa, program penataan fisik perumahan tidak cukup bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah dalam memberi dampak terhadap peningkatan status sosial maupun pendapatannya.

Dengan demikian, sebagaimana pada kasus tingkat perubahan fisik rumah dan tingkat perubahan sosial, maka faktor tingkat pendapatan dan ketrampilan kerja penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang berwenang di Kota Surakarta.

4.3.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS (lihat lampiran), maka faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi adalah faktor usia dan pekerjaan. Sedangkan untuk faktor pendidikan tidak mempengaruhi perubahan ekonomi.

Untuk faktor usia, kelompok penghuni yang berusia antara 31 – 46 tahun dan kelompok usia antara 47 – 62 tahun prosentase perubahan pendapatannya lebih tinggi dibanding kelompok usia 63 - 80 tahun.

Untuk faktor pekerjaan, kecenderungannya adalah bahwa penghuni yang bekerja sebagai buruh prosentase perubahan pendapatannya paling tinggi, sedangkan yang bekerja sebagai wiraswasta nomer dua, adapun yang paling rendah adalah penghuni yang bekerja sebagai PNS.

4.4. Rangkuman Hasil Analisis Perubahan

Berdasarkan kajian-kajian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat perubahan fisik rumah yang paling menonjol di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah adalah pada komponen kualitas lantai rumah, yaitu tingkat perubahan sedang (38%). Kemudian berkaitan dengan faktor usia, maka kelompok usia penghuni antara 31 – 62 tahun memiliki kemampuan memenuhi kualitas fisik rumah lebih baik dibanding kelompok usia 63 – 80 tahun. Kemudian dari faktor pendapatan nampak bahwa penghuni yang

pendapatannya dibawah Rp.250.000,- per bulan prosentase perubahan rumahnya paling kecil, sedangkan penghuni yang pendapatannya diatas Rp.500.000,- per bulan prosentase perubahan rumahnya paling tinggi. Dan dari faktor pekerjaan nampak bahwa, responden yang bekerja sebagai buruh prosentase perubahan rumahnya paling kecil, kemudian responden yang bekerja sebagai wiraswastawan prosentase perubahan rumahnya lebih besar dibanding buruh, sedangkan prosentase perubahan rumah yang paling besar adalah responden yang bekerja sebagai PNS.

Jadi nampaknya untuk memacu peningkatan perubahan fisik rumah di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah perlu dilakukan pembinaan terhadap ketrampilan kerja dan program peningkatan ekonomi penghuni.

Berkaitan dengan perubahan sosial, kajian diatas menunjukkan bahwa penataan permukiman liar yang kumuh di Kelurahan Sangkrah tidak banyak memberi dampak terhadap perubahan sosial. Tingkat perubahan tipe rumah tersebut sangat kecil dibanding tingkat perubahan fisik rumah. Dengan demikian, sebagaimana pada kasus tingkat perubahan fisik rumah, maka semakin memperkuat kesimpulan bahwa faktor tingkat pendapatan dan ketrampilan kerja penghuni di kawasan penataan di Kelurahan Sangkrah perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang berwenang di Kota Surakarta.

Dari faktor pendapatan nampak bahwa penghuni yang penghasilannya diatas Rp.500.000,- per bulan prosentase kemampuan berubah tipe rumahnya paling tinggi, sedangkan penghuni yang berpenghasilan antara Rp.250.00,- - Rp.500.000,- per bulan prosentase kemampuan merubah tipe rumahnya lebih rendah dibanding dengan di atas, sedangkan yang paling rendah kemampuan merubah tipe rumahnya adalah penghuni yang berpenghasilan dibawah Rp.250.000,- per bulan.

Untuk faktor pendidikan, ada kecenderungan penghuni yang pendidikannya SMA ke atas lebih mampu merubah tipe rumahnya, sedangkan untuk penghuni yang berpendidikan SMP dan SD ke bawah kemampuannya relatif sama.

Untuk faktor usia, yang menonjol lebih mampu merubah tipe rumahnya adalah penghuni kelompok usia antara 31 – 46 tahun, sedangkan untuk penghuni kelompok usia antara 47 – 62 tahun dan 63 - 80 tahun kemampuannya relatif sama.

Untuk faktor pekerjaan, kecenderungannya adalah bahwa penghuni yang bekerja sebagai wiraswastawan kemampuan merubah tipe rumahnya prosentasenya paling tinggi, sedangkan nomer dua adalah buruh, dan yang paling rendah kemampuan merubah tipe rumahnya adalah penghuni yang bekerja sebagai PNS.

Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan perubahan ekonomi, kajian diatas menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan tingkat pendapatan sebesar 7 atau 14% penghuni, dari yang tadinya tingkat pendapatannya dibawah Rp.250.000,- meningkat menjadi antara Rp.250.000,- - Rp.500.000,-. Namun fenomena tersebut menunjukkan bahwa apabila program penataan permukiman kumuh dan liar hanya menyentuh aspek fisik saja sedangkan aspek ekonomi penghuni tidak dibina, maka tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap perubahan tingkat pendapatan mereka.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi adalah faktor usia dan pekerjaan. Untuk faktor usia, kelompok penghuni yang berusia antara 31 – 46 tahun dan kelompok usia antara 47 – 62 tahun prosentase perubahan pendapatannya lebih tinggi dibanding kelompok usia 63 - 80 tahun.

Untuk faktor pekerjaan, kecenderungannya adalah bahwa penghuni yang bekerja sebagai buruh prosentase perubahan pendapatannya paling tinggi, sedangkan yang bekerja

sebagai wiraswasta nomer dua, adapun yang paling rendah adalah penghuni yang bekerja sebagai PNS.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta telah membawa dampak terhadap perubahan fisik rumah penghuni, berupa tingkat perubahan sedang sebesar 38 % pada komponen lantai, tingkat perubahan sangat tinggi sebesar 19 % pada komponen tinggi dinding tembok, dan tingkat perubahan sedang sebesar 15 % pada komponen rangka atap. Adapun faktor yang menonjol yang mempengaruhi perubahan fisik rumah adalah faktor usia, dimana kecenderungan penghuni yang berusia antara 31 – 46 tahun ternyata lebih mampu dalam memenuhi kualitas fisik rumahnya dibanding kelompok usia antara 63 – 80 tahun.
2. Penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta telah membawa dampak terhadap perubahan sosial. Dampak tersebut dapat dilihat pada perubahan tipe rumah penghuni, dimana yang paling menonjol adalah tingkat perubahan sangat tinggi sebesar 6 %, yaitu perubahan rumah ke tipe 45 . Dan sebagaimana halnya pada kajian perubahan fisik rumah, maka yang menonjol yang mempengaruhi perubahan tipe rumah adalah faktor usia, dimana kecenderungan penghuni yang berusia antara 31 – 46 tahun ternyata lebih mampu dalam merubah tipe rumahnya dibanding kelompok usia yang lebih tua. Maka sekali lagi fakta menunjukkan bahwa usia produktif di kawasan penataan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan bagi kemajuan lingkungan permukiman di kawasan tersebut dimasa-masa mendatang.

3. Penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta telah membawa dampak terhadap perubahan ekonomi penghuni. Dampak tersebut dapat dilihat dari tingkat perubahan pendapatan penghuni, yaitu tingkat perubahan sedang sebesar 14 %. Adapun faktor potensial yang mempengaruhi perubahan pendapatan adalah faktor usia muda/produktif, dimana kelompok usia 31 – 46 tahun paling menonjol perubahan pendapatannya.

5.2. Rekomendasi

Kajian terhadap perubahan fisik rumah penghuni pada periode pasca penataan permukiman liar dan kumuh di Kelurahan Sangkrah menunjukkan tingkat perubahan yang rendah. Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam periode pasca pembangunan perumahan, penghuni tidak banyak melakukan perubahan terhadap fisik rumahnya. Apabila dikaitkan dengan data penghuni, dimana 77 % penghuni masih berpendapatan dibawah Rp.250.000,- per bulan, dan 65 % penghuni hanya tamat SD dan tidak sekolah, serta 67 % penghuni bekerja sebagai buruh, maka fenomena rendahnya tingkat perubahan fisik rumah di kawasan penataan tersebut karena disebabkan oleh masih lemahnya tingkat pendapatan penghuni serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan tersebut.

Begitu pula yang berkaitan dengan perubahan sosial, menunjukkan tingkat perubahan yang rendah. Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam periode pasca pembangunan perumahan, penghuni tidak banyak melakukan perubahan terhadap tipe rumahnya. Sebagaimana dalam kasus perubahan fisik rumah di atas, maka apabila dikaitkan dengan data penghuni yang 77 % masih berpendapatan dibawah Rp.250.000,- per bulan, 65 % penghuni hanya tamat SD dan tidak sekolah, serta 67 % penghuni bekerja sebagai buruh, maka fenomena rendahnya tingkat perubahan tipe rumah di kawasan

penataan tersebut karena memang disebabkan oleh masih lemahnya tingkat pendapatan penghuni serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan tersebut.

Kemudian dalam aspek perubahan ekonomi pun menunjukkan tingkat perubahan rendah. Namun satu hal yang berkaitan dengan potensi, dapat dideteksi bahwa faktor usia muda/produktif ternyata yang menonjol yang mempengaruhi terjadinya perubahan di kawasan tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa usia produktif di kawasan penataan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan bagi kemajuan lingkungan permukiman di kawasan tersebut dimasa-masa mendatang.

Oleh karena itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa perlu diadakan pembinaan terhadap peningkatan ketrampilan kerja dan peningkatan ekonomi, khususnya kepada penghuni yang masih berusia muda/produktif di kawasan tersebut.

Disamping itu, dalam program penataan permukiman liar dan kumuh di wilayah perkotaan, yang karakteristiknya mirip dengan kasus di Kelurahan Sangkrah, nampaknya perlu diikuti dengan pembinaan terhadap aspek ekonomi penghuni, sehingga perubahan fisik rumah, sosial dan ekonomi penghuni akan lebih meningkat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta , 1998.
- Amirin, Tatang M., Menyusun Rencana Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2000.
- Bratt, Rachel G., Rebuilding a Low – Income Housing Policy, Temple University Press, Philadelphia The United State of America, 1989,.
- Budihardjo, Eko, Kota Berkelanjutan, Alumni, Bandung, 1999.
- Budihardjo, Eko, Arsitektur & Kota di Indonesia, Alumni, Bandung 1997.
- Budihardjo, Eko, Kota Berwawasan Lingkungan, Alumni, Bandung, 1993.
- Bryant Coralie and Louise G.White, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Erna Widodo & Mukhtar, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif, Avyrouz, Yogyakarta, 2000.
- Evers, Hans-Dieter, Sosiologi Perkotaan, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Jellinek, Lea, Seperti Roda Berputar Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Yayasan REI – PT.Rakasindo, Jakarta, 1997.
- Kuncoro, Mudrajad, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997.
- Nining, Ekonomi, Perencanaan & Manajemen Kota, MPKP – UI, Jakarta, 2000.
- Panudju, Bambang, Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Alumni, Bandung, 1999.
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan Karseno, Ekonomi Perkotaan, BPFE, Yogyakarta, 1994.

Riduwan dan Tita Lestari, Dasar-Dasar Statistika, Alfabeta, Bandung, 2001.

Rukmana, Nana, dkk, Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan, LP3ES, Jakarta, 1993.

Silas, Johan, Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Yayasan Keluarga Bhakti dan Surabaya Post, Surabaya, 1996.

Silas, Johan, Permukiman Marjinal Amat Liat, dalam Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Yayasan Keluarga Bhakti dan Surabaya Post, Surabaya, 1996,

Silas, Johan, KIP Dalam Telaah Bank Dunia, dalam Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Yayasan Keluarga Bhakti dan Surabaya Post, Surabaya, 1996.

Sudaryono, Konsep Kemitraan Dalam Pembangunan Perumahan, dalam Prosiding URDI, Jakarta, 1997.

Sobirin, Distribusi Pemukiman dan Prasarana Kota : Studi Kasus Dinamika Pembangunan Kota di Indonesia, dalam Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus, UIP. Jakarta, 2001.

Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni, Bandung, 1994.

Suharto, Heru, Surakarta Hadiningrat Dalam Strategi Elit Suatu Analisis Kepemimpinan, PWI Cabang Surakarta, Surakarta, 1994.

Tjokrowinoto, Moeljarto, Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Usman, Husaini dan R.Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Yudohusodo, Siswono, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta, 1991.

Kebijakan/Jurnal/Bulletin/Majalah :

Ditjen.Perumahan dan Permukiman Dep.Kimpraswil, Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan & Permukiman, Jakarta, 2002.

Kantor Menteri Negara KLH, Kependudukan dan Lingkungan Hidup Suatu Tinjauan, Jakarta, 1989.

Kurniasih, Nia Pontoh, *Pola Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kampung Cibangkong Bandung*, dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota No.12, Jurusan Teknik Planologi ITB, Bandung, 1993.

Pemda Kotamadya Surakarta, *Sejarah Berdirinya Kota Sala*, Surakarta, 1997.

URDI, *Prosiding Seminar Nasional Kemitraan Dalam Pembangunan Perumahan*, Jakarta, 1997.

Silas, Johan, *Evaluasi Pembangunan Perumahan Tinjauan Kritis Terhadap Keterlibatan Rakyat*, dalam Prosiding URDI, 1997.

Quesioner Penelitian

**KAJIAN PASCA HUNI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN IZIN
PEMKOT
DI KELURAHAN SANGKRAH KOTA SURAKARTA**

Sebelum wawancara berlangsung, lakukan pendekatan terlebih dahulu dengan mengucapkan salam, kemudian perkenalkanlah diri anda.

Jelaskan secara sederhana tujuan penelitian dan tekankan bahwa kerahasiaan responden terjamin.

Ciptakan suasana segar dan akrab agar wawancara dapat berlangsung baik dan lancar.

I. Identitas Responden :

1. Nama kepala keluarga :
2. Alamat kepala keluarga : RT. RW.
Lingkungan
Kelurahan Sangkrah
3. Umur kepala keluarga : tahun
4. Agama/kepercayaan :
 - a. Islam
 - b. Kristen
 - c. Katholik
 - d. Hindu
 - e. Budha
5. Status perkawinan :
 - a. Belum kawin
 - b. Kawin
 - c. Janda
 - d. Duda
6. Jumlah penghuni rumah = orang

II. Perbedaan Kondisi antara Tahun 1990 dengan Tahun 2002

No.	Daftar Pertanyaan	Pada Tahun 1990	Pada Tahun 2002
1.	Tingkat pendidikan bapak :	a. Tidak sekolah b. Tamat SD c. Tamat SMP d. Tamat SMA e. Sarjana Muda f. Sarjana	a. Tidak sekolah b. Tamat SD c. Tamat SMP d. Tamat SMA e. Sarjana Muda f. Sarjana
2.	Tingkat pendidikan ibu :	a. Tidak sekolah b. Tamat SD c. Tamat SMP d. Tamat SMA e. Sarjana Muda f. Sarjana	a. Tidak sekolah b. Tamat SD c. Tamat SMP d. Tamat SMA e. Sarjana Muda f. Sarjana
3.	Usia anak pertama : Pendidikan : tahun a. Tidak sekolah b. SD c. SMP d. SMA e. Perguruan Tinggi tahun a. Tidak sekolah b. SD c. SMP d. SMA e. Sarjana
4.	Usia anak kedua : Pendidikan : tahun a. Tidak sekolah b. SD c. SMP d. SMA e. Perguruan Tinggi tahun a. Tidak sekolah b. SD c. SMP d. SMA e. Sarjana
5.	Usia anak ketiga : Pendidikan : tahun a. Tidak sekolah b. SD c. SMP d. SMA e. Perguruan Tinggi tahun a. Tidak sekolah b. SD c. SMP d. SMA e. Sarjana

No.	Daftar Pertanyaan	Pada Tahun 1990	Pada Tahun 2002
6.	Pekerjaan bapak : Keterangan : - Wiraswasta meliputi : pedagang, penjahit, pengrajin sablon/batik/ukir, montir, tukang, dll.; - Buruh meliputi : buruh pabrik, pelayan, sopir, pengayuh becak, satpam, kuli, dll.	a. PNS/TNI/POLRI b. Pensiunan c. Wiraswasta d. Buruh e. Pemulung f. Pengangguran	a. PNS/TNI/POLRI b. Pensiunan c. Wiraswasta d. Buruh e. Pemulung f. Pengangguran
7.	Pekerjaan ibu : Keterangan : - Wiraswasta meliputi : pedagang, penjahit, pengrajin sablon/batik/ukir, montir, tukang, dll.; - Buruh meliputi : buruh pabrik, pelayan, sopir, pengayuh becak, satpam, kuli, dll.	a. PNS/TNI/POLRI b. Pensiunan c. Wiraswasta d. Buruh e. Pemulung f. Pengangguran	a. PNS/TNI/POLRI b. Pensiunan c. Wiraswasta d. Buruh e. Pemulung f. Pengangguran
8.	Tingkat pendapatan keluarga per bulan :	a. DibawahRp.250.000,- b. 250.000 – 500.000 c. 500.000 – 750.000 d. Diatas Rp.750.000,-	a. DibawahRp.250.000,- b. 250.000 – 500.000 c. 500.000 – 750.000 d. Diatas Rp.750.000,-
9.	Lantai rumah terbuat dari:	a. Tanah b. Plesteran semen pasir c. Tegel d. Keramik	a. Tanah b. Plesteran semen pasir c. Tegel d. Keramik
10.	Tinggi lantai dari halaman :	a. 0 b. 10 cm c. 20 cm d. 30 cm	a. 0 b. 10 cm c. 20 cm d. 30 cm

No.	Daftar Pertanyaan	Pada Tahun 1990	Pada Tahun 2002
11.	Tinggi dinding tembok :	a. 0 b. 90 cm c. 150 cm d. 300 cm	e. 0 f. 90 cm g. 150 cm h. 300 cm
12.	Tinggi dinding KM & WC :	a. 0 b. 90 cm c. 150 cm d. 300 cm	a. 0 b. 90 cm c. 150 cm d. 300 cm
13.	Penutup langit-langit dari :	a. Tidak ada b. Gedeg (anyaman bambu) c. Triplek	a. Tidak ada b. Gedeg (anyaman bambu) c. Triplek
14.	Rangka kuda-kuda & gorden dari	a. Bambu b. Kayu c. Besi/baja	a. Bambu b. Kayu c. Besi/baja
15.	Bahan kaso & reng dari :	a. Bambu b. Kayu	a. Bambu b. Kayu
16.	Penutup atap dari :	a. Asbes gelombang b. Seng gelombang c. Genteng sederhana d. Genteng pres/beton	a. Asbes gelombang b. Seng gelombang c. Genteng sederhana d. Genteng pres/beton
17.	Luas lantai :	a. 18 m ² b. 27 m ² c. 36 m ² d. 45 m ²	a. 18 m ² b. 27 m ² c. 36 m ² d. 45 m ²

No.	Daftar Pertanyaan	Pada Tahun 1990	Pada Tahun 2002
18.	Kamar mandi :	a. Tidak ada b. Ada	a. Tidak ada b. Ada
19.	WC :	a. Tidak ada b. Ada	a. Tidak ada b. Ada
20.	Jendela :	a. Tidak ada b. Ada	a. Tidak ada b. Ada
21.	Tempat sampah :	a. Tidak ada b. Ada	a. Tidak ada b. Ada
22.	Aliran listrik :	a. Tidak ada b. Ada	a. Tidak ada b. Ada
23.	Air bersih dari :	a. Sungai b. Sumur c. PAM	a. Sungai b. Sumur c. PAM

III. Tingkat Perubahan Kualitas Rumah.

24. Apakah bapak/ibu pernah meningkatkan/merubah rumah ini?
- Tidak pernah
 - Pernah merubah bentuk rumah dan meningkatkan mutu bahan
 - Pernah menambah jumlah ruangan (kamar, dapur, kamar mandi)

25. Apakah bapak /ibu pernah mengganti bahan bangunan rumah ini?
- a. Tidak pernah
 - b. Pernah mengganti lantai tanah dengan semen pasir
 - c. Pernah mengganti lantai semen pasir dengan tegel
 - d. Pernah mengganti tegel dengan keramik
 - e. Pernah mengganti dinding gedeg dengan batu bata
 - f. Pernah mengganti rangka atap dengan kayu
 - g. Pernah mengganti penutup atap dengan asbes/seng/genteng
26. Apa yang bapak/ibu lakukan dalam memelihara rumah ini?
- a. Mengecat rumah setahun sekali
 - b. Menambal atap yang bocor
 - c. Mengganti pintu yang lapuk
 - d. Membersihkan rumah tiap hari

Sebelum meninggalkan rumah responden, periksalah sekali lagi :

- Apakah semua pertanyaan di dalam questioner sudah ditanyakan;
- Kelengkapan jawaban;
- Apakah ada tulisan yang tidak terbaca oleh orang lain

Jangan lupa, ucapkanlah salam dan terimakasih kepada responden.